

BAB V

PEMBAHASAN

Ketika mendengar Pajangan, banyak orang membayangkan tentang penolakan camat, kenapa ini bisa terjadi? Penolakan camat dari masyarakat langka terjadi seperti di Pajangan, penolakan camat di Pajangan memang tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan masyarakat luas terhadap kecamatan Pajangan banyak beraura negatif. Hal tersebut merupakan suatu asumsi yang memang tidak dapat disalahkan. Karena berbagai kondisi instabilitas acapkali mengiringi kehidupan masyarakat Pajangan. Keadaan tidak kondusif yang terjadi saat ini.

Namun, dibalik pandangan banyak masyarakat terhadap kecamatan Pajangan dari sisi negatifnya. Kita juga bisa mendapatkan berbagai macam hal positif dan banyak hal yang dimanfaatkan. Salah satu contohnya adalah Pajangan dikenal sebagai wilayah yang produktif terhadap batik. Hal tersebut merupakan salah satu daerah tujuan utama bagi para wisatawan sejak Yogyakarta dikenal sebagai penghasil batik. Produktifnya masyarakat Pajangan tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat Pajangan makin dikenal para wisatawan. Banyak wisatawan yang hadir di tengah masyarakat terkadang menjadi suatu kebanggaan.



Gambar 5. 1 Aksi ormas FJI penolakan camat no-muslim depan Greja Pajangan

A. Konflik Yang Muncul di Kecamatan Pajangan

Konflik telah hadir di tengah masyarakat kecamatan Pajangan, tentu dengan berbagai faktor pendorong dan berbagai macam hal yang melatar belakangi. Konflik memiliki kekhasan masing-masing, konflik yang diangkat dalam penelitian ini memiliki kekhasan dan ciri khas masing-masing, terutama apabila ingin menyoroti terkait type konflik yang mendera masyarakat.

Keadaan sosial masyarakat yang ada di Kecamatan Pajangan dalam keadaan sehari-hari dapat dikatakan berjalan normal, layaknya keadaan masyarakat pada umumnya, namun bila dilihat dan ditelaah lebih mendalam, ada momen-momen tertentu yang membuat keadaan sosial masyarakat di Kecamatan ini berubah. Perubahan Sosial yang terlihat signifikan dan drastis adalah ketika ada penolakan Camat Pajangan, dimana terdapat penolakan yang cenderung berujung konflik yang terjadi di Pajangan. Konflik terjadi dengan berbagai alasan dan berbagai latar dari berbagai kasus konflik, kemudian muncullah berbagai analisis penyebab konflik yang terjadi. Mulai dari faktor kebijakan, agama, budaya hingga dari masalah-masalah yang bermula kecil namun lambat laun menjadi konflik dan membawa isu-isu sensitif dan membawa dampak yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat.



Gambar 5. 2 Photo kampanye penolakan camat sumber: www.KonflikCamatPajangan

Di akhir tahun 2016, telah terjadi protes besar-besaran oleh masyarakat pajangan. Mereka menolak atas penempatan camat yang bukan muslim, alasan mereka adalah berkaitan dengan keyakinan (*belive*) mayoritas di pajangan yaitu muslim. Hal ini banyak mengundang perdebatan teka-keti konflik ini, sesungguhnya apa yang terjadi. Karena, secara umum aksi protes masyarakat pajangan menunjukkan inteloransi antar umat beragama. Hal ini lah yang muncul di permukaan. kebijakan mutasi Bupati Bantul Suharsono menuai penolakan dari tokoh masyarakat kecamatan Pajangan menggeruduk kantor DPRD Bantul. Mereka mendesak bupati segera mengganti Camat Pajangan terlantik Yulius Suharta, Warga Pajangan mengungkapkan, masyarakat Pajangan langsung bergejolak begitu mendengar camat Pajangan diganti dengan wajah baru. Sebab, sosok camat baru ini dianggap tidak cocok dengan karakteristik masyarakat Pajangan. Masyarakat mengkritik bupati Bantul dalam mutasi camat Pajangan keliru. Yakni, tidak mempertimbangkan berbagai aspek di tengah masyarakat. Termasuk di antaranya sosiologi masyarakat Pajangan, Bupati juga tidak mempertimbangkan sejarah. Mengingat, masyarakat Pajangan beberapa tahun lalu pernah menolak keras penempatan camat baru. Sebab, sosok camat baru ini dianggap tidak mewakili karakteristik masyarakat setempat. Beberapa tahun lalu hanya 10 hari kemudian diganti. Sementara itu, anggota Komisi A Heru Sudibyo menyatakan, Komisi A tidak pernah diajak berkoordinasi terkait mutasi. Dengan adanya penolakan ini, politikus Partai Golkar ini pun mendorong bupati segera melakukan pergantian.

Mufassir, yang juga perwakilan warga, menyatakan pengangkatan Yulius sebagai Camat Pajangan telah dilakukan Bupati Suharsono. Pihaknya mengaku menolak apabila ada proses serah terima jabatan camat di Kecamatan Pajangan. (Wawancara Mei 2017)

Puluhan warga Pajangan mendatangi kantor DPRD Bantul pada 6 Januari 2017 dan menyampaikan keberatan mereka atas terpilihnya Camat Pajangan yang baru, Yulius Suharta. perwakilan warga bersama anggota DPRD Bantul dari Fraksi PKS, PPP, Golkar, PKB, PAN, dan Gerindra, mendatangi Bupati Suharsono.

Sebagian besar warga Pajangan menginginkan agar Camat Pajangan yang baru diganti, dan warga meminta agar keinginan mereka disampaikan kepada Bupati Bantul. Penolakan sejumlah warga Pajangan terhadap Yulius Suharta dan dukungan fraksi-fraksi di DPRD disesalkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bantul. Dia menilai peristiwa itu bisa memicu konflik dan ditiru di daerah lain. "Ini dapat mencederai kebhinekaan Indonesia. Ini namanya nasionalisme sempit. Padahal Indonesia itu berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Saya melihatnya ini kental nuansa politis. Penolakan warga Pajangan terhadap pemimpin non-muslim adalah insiden intoleransi terbaru di Yogyakarta. Sebagaimana dicatat Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, terjadi 13 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Yogyakarta sepanjang 2011 sampai 2015. Bayu Dardias, dosen ilmu politik Universitas Gajah Mada (UGM), menilai insiden-insiden intoleransi di Yogyakarta menguatkan predikat provinsi itu sebagai "daerah paradoks". Pada satu sisi, menurutnya, Yogyakarta adalah basis gerakan radikal sejak era kejatuhan Presiden Suharto. Di sisi lain, sejumlah gerakan toleransi berpusat di Yogyakarta. Misalnya, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Konsorsium Kajian Keagamaan hasil kerjasama UGM, UIN, dan Sanata Darma yang berupaya menciptakan toleransi pada ranah akademik. Peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya merupakan terusan dari sebuah proses panjang terhadap paradoks di Bantul.

"Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bantul, Timbul Harjana, menyatakan mendukung keputusan bupati untuk tetap menetapkan Yulius sebagai camat Pajangan. "Itu (penetapan Yulius sebagai Camat Pajangan) sudah benar, dan kami mendukung keputusan Bupati Bantul," (Wawancara Mei 2017)

Sebagaimana diungkap di depan, bahwa munculnya konflik dikarenakan adanya perbedaan dan keragaman. Berkaca dari pernyataan tersebut, Bantul adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Yogyakarta yang berpotensi konflik. Dilihat dari berita dan media masa, konflik yang terjadi konflik vertikal. Konflik menunjuk pada konflik yang berkembang di antara anggota masyarakat dan negara yang bernuansa, suku, agama, ras, dan antara golongan seperti yang terjadi poso dan papua. Konflik

vertikal konflik yang terjadi antara masyarakat dan negara. Umumnya konflik ini terjadi karena ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah. Seperti konflik kebijakan pemerintah Bantul atas penetapan camat Pajangan sehingga menimbulkan gerakan-gerakan civil society.

Pimpinan Pondok Pasantren Al-Ihdad mengemukakan bahwa. Sepanjang sejarah agama dapat memberi sumbangsih positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun sisi yang lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Ini adalah sisi negatif dari agama dalam mempengaruhi masyarakat Dan hal ini telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Pada bagian ini akan diuraikan sebab terjadinya konflik masyarakat yang di latarbelakangi dengan agama khususnya yang terjadi di Pajangan. (Wawancara Mei 2017)

Perbedaan Doktrin dan Sikap Mental. Sebagian pihak masyarakat Pajangan yang sedang terlibat dalam protes penolakan camat Pajangan masyarakat protes dikarenakan tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat mayoritas. Entah sadar atau tidak, setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya, membandingkan dengan ajaran agama lawan, memberikan penilaian atas agama sendiri dan agama lawannya. Dalam skala penilaian yang dibuat (subyektif) nilai tertinggi selalu diberikan kepada agamanya sendiri dan agama sendiri selalu dijadikan kelompok patokan, sedangkan lawan dinilai menyalahi. Agama Islam dan Kristen di Bantul, merupakan agama samawi (revealed religion), yang meyakini terbentuk dari wahyu Ilahi Karena itu memiliki rasa superior, sebagai agama yang berasal dari Tuhan. Di beberapa tempat terjadinya protes dari kalangan kelompok ormas, memandang penunjukan camat tidak sesuai dengan kultur masyarakat setempat, dengan demikian ormas sebagai wadah penolakan camat dan politik di samping agama. Karena itu, faktor perbedaan doktrin dan sikap mental, dan kelompok masyarakat Islam dan Kristen punya andil sebagai pemicu konflik.

Peace building dibutuhkan untuk benar-benar memutus rantai penolakan/konflik yang berulang kali terjadi, namun dalam peace building

dibutuhkan adanya keseriusan dari semua pihak untuk menjalankan berbagai program yang berusaha dimasukkan dalam proses peace building, karena peace building tidak hanya berpatokan pada pembangunan secara fisik saja, namun dapat dilihat lebih dalam adalah bagaimana peace building harus menyusur ke semua sektor kehidupan masyarakat, karena rekonstruksi pasca konflik harus menyeluruh, seperti dari sisi psikologis, ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Dengan perhatian ke semua sektor kehidupan masyarakat, keadaan damai yang abadi pasca konflik diharapkan akan terealisasi di tengah masyarakat yang akan benar-benar dapat mendapatkan keadilan dan akan menghentikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat.

Dapat dilihat bagaimana post conflict management sangatlah penting, terutama bagaimana menyangkut terhadap peace keeping dan peace building, karena keberhasilan mewujudkan suatu perdamaian yang abadi tidak jauh dari bagaimana menerapkan kedua aspek tersebut, karena aspek terpenting adalah bagaimana menyelesaikan masalah tidak hanya sebatas berdamai secara fisik saja, namun harus dilihat bagaimana akar konflik yang akan dan bagaimana cara menjaga perdamaian setelah perdamaian diwujudkan, tidak berhenti sampai situ saja setelah perdamaian dijaga harusnya ada tindakan konkrit untuk membangun dari berbagai sektor kehidupan masyarakat, karena diharapkan pembangunan yang merata di segala aspek kehidupan masyarakat akan menghilangkan jurang perbedaan sehingga dapat meminimalisir potensi konflik.

Dapat Dilihat bahwa berbagai konflik yang terjadi secara garis besar pasti sudah diatasi dan sudah diselesaikan dengan berbagai cara, namun, dalam keadaan masyarakat saat ini tidak hanya sebatas resolusi sementara yang dikeluarkan dan dikemukakan, tetapi, tahap lebih jauh adalah bagaimana manajemen pasca konflik yang terjadi pada tataran apakah perdamaian yang terealisasi dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama, setelah itu dalam tahap yang lebih jauh, untuk mendapatkan perdamaian yang abadi harus adanya peran dari semua pihak dalam

mewujudkan konsep-konsep yang mengarah pada pembangunan perdamaian di semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga perdamaian jangka panjang dapat terwujud dan terus terjaga.

Perbedaan Suku dan Ras Pemeluk Agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan ras dan agama memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat. Contoh di kecamatan Pajangan, Bantul, sebagian masyarakat menolak camat karena perbedaan agamanya. Di beberapa tempat di Indonesia yang terjadi kerusuhan seperti: Poso, Tolikara, dan Singkil, massa yang mengamuk adalah penduduk setempat. Sedangkan yang menjadi korban keganasan massa adalah yang umumnya perbedaan dengan Agama mayoritas. Jadi, nampaknya perbedaan kultur dan suku disertai perbedaan agama ikut memicu terjadinya konflik.

Perbedaan Tingkat Kebudayaan. Agama sebagai bagian dari budaya bangsa manusia. Kenyataan membuktikan perbedaan budaya berbagai bangsa di dunia tidak sama. Secara sederhana dapat dibedakan dua kategori budaya dalam masyarakat, yakni budaya tradisional dan budaya modern. Tempat-tempat terjadinya konflik antar kelompok masyarakat Pajangan, beberapa waktu lalu, nampak perbedaan antara dua kelompok yang konflik itu. Kelompok masyarakat setempat memiliki agama mayoritas yaitu muslim. Sedangkan yang menjadi lawan dari masyarakat adalah negara, dimana negara mengambil kebijakan tidak melihat kondisi sosial masyarakat Pajangan.

Perbedaan agama dalam kelompok masyarakat di suatu tempat atau daerah ternyata sebagai faktor pendorong yang ikut mempengaruhi terciptanya konflik. Tetapi dalam masyarakat agama pluralitas penyebab terdekat adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Di berbagai tempat terjadinya konflik, massa yang menuntut adalah beragama Islam sebagai kelompok mayoritas sedangkan

yang ditekan adalah kebijakan Bupati Bantul karena menunjuk camat yang berbeda keyakinan di masyarakat setempat. Sehingga nampak kelompok Islam yang mayoritas merasa berkuasa atas daerah yang didiami lebih dari kelompok minoritas yakni orang Kristen. Karena itu, di beberapa tempat orang Kristen sebagai kelompok minoritas sering mengalami kerugian fisik, seperti: pengrusakan dan pembakaran gedung-gedung ibadah.

Bila dicermati secara mendalam konflik yang terjadi masyarakat dan Negara, lebih kepada konflik bersifat realistik, karena konflik yang terjadi jelas dengan tuntutan yang mereka inginkan adalah pergantian camat. Seperti apa yang dikatakan Lewis Coser dalam Polloma (1994, 111-114) yaitu konflik realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari tuntutan perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditunjukkan pada objek yang dianggap mengecewakan. Dalam hal ini, ada yang perlu disayangkan, secara alasan tuntutan mereka sudah jelas, ingin pergantian camat baru karena tidak sesuai dengan keadaan masyarakat setempat, namun proses yang dilakukan untuk memperoleh tujuan tersebut yang dapat dikatakan kurang tepat dan dengan diiringi hal-hal yang justru mengundang masalah lain dengan adanya hukum yang dilanggar, seperti UUD ASN tahun 2014.

Keadan konflik yang begitu menyedot perhatian berbagai kalangan disebabkan oleh adanya keterlibatan aktor politik. Aktor politik yang berasal dari kalangan partai Nasional. Mobilisasi massa yang digunakan banyak pihak guna menambah amunisi sangat disayangkan, karena aktor-aktor dari partai dan kelompok yang ikut andil mayoritas memberikan bantuan tanpa tahu masalah yang sebenarnya terjadi, dan tanpa memikirkan konsekuensi apa yang akan ditimbulkan kedepannya. Faktor-faktor tersebut menjadi titik terpenting dalam proses eskalasi dalam sebuah konflik. Permasalahan yang awalnya hanya sebatas penolakan camat, berkembang menjadi konflik besar yang melibatkan isu etnisitas dan agama. Konflik merupakan sebuah fenomena sosial yang tidak terbentuk secara spontan namun ledakan konflik

terjadi karena timbunan permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik. Kesenjangan sosial, kegagalan membangun pola komunikasi yang baik antar masyarakat, ketidak mampuan elit lokal dalam manajemen konflik, hingga karakter-karakter yang saling berbeda dalam masyarakat menjadi element penting dalam menciptakan konflik sosial yang besar dalam masyarakat, atau yang dalam perspektif Jackues Bertrand disebut sebagai aspek *konstruktifis* dan *primordialisme* (Bertrand, 2012.).

Secara garis besar, sejarah konflik terjadi di Kecamatan Pajangan dapat dikategorisasikan menjadi beberapa penyebab besar, yang pertama adalah, terkait penyebab kultural, seperti perselisihan perbedaan agama, ras, kebijakan dll, kemudian terkait, antara masyarakat melawan negara, ataupun masyarakat melawan corporate tertentu.

Catatan konflik yang dijelaskan diatas hanya konflik masyarakat dengan Negara di Kecamatan Pajangan, terutama konflik yang cukup mendapat perhatian dari masyarakat luas, sehingga dampak yang dihasilkan cukup luas dan menarik perhatian publik lokal maupun nasional.. Sehingga berdampak kecil atau besar merubah keadaan sosial politik lokal hingga nasional. Sejarah kelam tentang konflik yang terjadi di Kecamatan Pajangan, tidak dipungkiri akan membawa dampak pada kehidupan yang akan datang, karena sejarah yang ada tidak dapat serta merta dihilangkan dari kehidupan masyarakat kedepannya. Dapat dipastikan sejarah akan membentuk kehidupan sosial politik di kemudian hari.

Sumber Foto: www.KonflikCamatPajangan

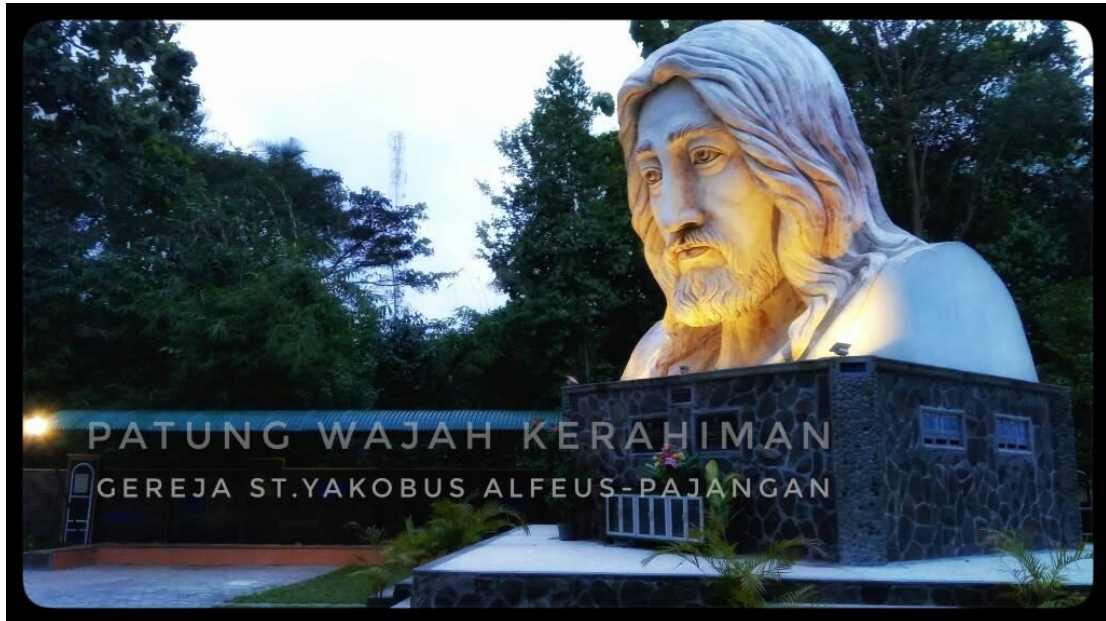


Gambar 5. 3 salah satu media televisi menyiarkan terkait dengan konflik di Pajangan

1. Konflik Vertical Pajangan

Yang pertama disoroti adalah terkait konflik kecamatan Pajangan yang terjadi di tahun 2016 akhir. Konflik yang terjadi antara negara dalam hal ini, aparat pemerintahan berhadapan dengan warga yang menolak camat Pajangan dari ketentuan yang telah diatur dan diperbolehkan di Indonesia. Atas dasar penolakan camat tersebut tindakan represif dilakukan oleh warga dalam hal ini masyarakat Pajangan melakukan demo dengan dalih ingin membatasi agar masyarakat Pajangan tidak dipimpin oleh camat yang non muslim, yang kemungkinan kedepannya akan menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh pihak masyarakat merupakan tindakan persuasif. Upaya persuasif yang dilakukan pemerintah justru tidak mendapat tanggapan. Sehingga upaya demo akhirnya digunakan sebagai langkah akhir dalam penolakan tersebut.

“Menurut Temu Panggih Raharjo, perwakilan warga Pajangan mengatakan bahwa penetapan Yulius sebagai Camat Pajangan tak sesuai dengan karakter dan kondisi psikologis warga. Pasalnya di daerah Pajangan pernah terjadi peristiwa pelarangan pendirian patung di sebuah gereja di wilayah Pajangan pada Oktober 2016. Masyarakat masih terluka dengan masalah lama. Masyarakat yang belum paham, (permasalahan) terbawa, seperti ada SARA,” ujarnya di Kantor Bupati Bantul, Yogyakarta, (Wawancara Januari 2017)



Gambar 5. 4 Patung yang menjadi kontrversi sebelum pelantikan camat

Isu terkait agama memang sangat sensitif di era Orde Baru, terutama bila dilihat dari sisi historis yang ada. Masyarakat Pajangan diyakini sebagai kelompok Islam Moderat yang dipercayai kedepannya akan dapat menjaga kestabilan Kecamatan Pajangan. Pergolakan antara warga masyarakat dan pemerintah merupakan ketegangan yang bersifat vertical, dimana masyarakat yang dianggap melawan kebijakan Pemerintah Bantul.

Bupati Bantul menegaskan bahwa pengisian jabatan tidak melihat agama, namun berdasarkan kinerja dari yang bersangkutan. Keberadaan Camat Pajangan justru untuk mempererat keberagaman, mempertahankan kebhinekaan yang ada di Kecamatan Pajangan," Suharsono menyatakan tak akan mengganti atau memindahkan Camat Julius sebelum mengetahui secara pasti dan benar permasalahan di masyarakat Pajangan. (Wawancara Mei 2017)



Gambar 5. 5 Pernyataan Bupati Bantul di salah satu media televisi terkait dengan seleksi Camat di Pajangan

Berbagai alasan dikemukakan oleh masyarakat Pajangan, tentu dengan dalih pembenaran dengan apa yang mereka lakukan. Masyarakat dan pemerintah menjadi korban dari peristiwa ini menurut laporan dari Tribun Jogja (2016), hasil dari perlakuan represif yang dilakukan oleh pemerintah, karena ketika ada upaya-upaya melawan ataupun bertolak belakang dengan apa yang sudah di atur oleh Negara, maka akan dengan mudah Negara menyelesaikan hal tersebut, tentu dengan dalih yang mereka anggap benar-benar.

Konteks kasus Kecamatan Pajangan yang terkenal dengan pemerintahan yang sangat kuat, terutama bicara masalah kekuatan keamanannya yang ditopang oleh TNI ataupun POLRES setempat. Pemerintah dengan penuh di back up oleh aparat. Sehingga apabila ada konflik yang bersifat vertical dapat dipastikan negara akan lebih superior, dan secara otomatis masyarakat akan menjadi inferior, dan kadangkala tidak penting untuk difikirkan pihak masyarakat yang salah atau benar, ketika negara sudah maju dalam proses penanganan, apapun yang mereka lakukan akan dibenarkan oleh negara. Walaupun harus dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya sendiri, karena ketika mereka menganggap ada sedikit penyimpangan, maka apa

yang mereka pandang pasti benar, dan bicara benar atau salah tidak sampai pada tahap meja hijau.

Konflik yang bersifat vertical memang cenderung ke arah konflik yang berbau gerakan radikal, baik agama ataupun suku. Kemudian adanya gerakan separatis yang memiliki tuntutan besar akan diberikannya hak kemerdekaan bagi suatu daerah, ini merupakan beberapa type yang menggambarkan adanya perbedaan titik antara konflik yang bersifat vertical dan horizontal. Memang cukup jarang ditemui, terutama di Kecamatan Pajangan terkait konflik yang bersifat vertical, paling tidak, konflik yang terjadi di Kecamatan Pajangan yang menyeret antara masyarakat dan pemerintah, ada peristiwa cukup besar terkait antara pemerintah dan masyarakat tepatnya di Jakarta, sehingga ribuan warga melakukan aksi terhadap pernyataan Gubernur Ahok kala itu yang anggap menistakan Agama.

Dapat dikatakan bahwa konflik di kecamatan Pajangan bersifat vertical telah terjadi, dan saat ini sangat jarang sekali konflik vertical tersebut hadir di kecamatan Pajangan, konflik yang biasa hadir di tengah masyarakat saat ini lebih cenderung bersifat horisontal antar kelompok masyarakat. Dalam bagian selanjutnya akan membahas bagaimana konflik dengan type yang berbeda. Pembahasan akan terkait konflik yang melibatkan antar kelompok masyarakat, tentu dengan kepentingan dan tujuan masing-masing.

Dalam perjalanan mencatat bahwa kecamatan Pajangan diguncang oleh persoalan konflik, dengan berbagai penyebab dan berbagai macam aktor yang bermain dalam ranah tersebut, ada yang memanfaatkan ada pula yang dirugikan. Namun, dapat dipastikan bahwa konflik yang terjadi diberbagai tempat dibelahan dunia ini pasti mengarah kepada konflik yang mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, dewasa ini sudah banyak orang melihat konflik dari berbagai sudut pandang yang berbeda, tidak melulu melihat suatu konflik sebagai suatu masalah yang harus dihindari, tapi sudah banyak orang melihat bagaimana konflik itu sebagai suatu musuh yang harus dihadapi dan dihentikan, tentu dengan berbagai cara yang dapat diterima dan tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari, hal yang lebih

jauh kedepannya adalah untuk melihat betapa pentingnya proses pencegahan daripada harus “mengobati”, tentu dengan satu tujuan utama yaitu Damai.

Dalam bab V akan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian konflik yang terjadi di kecamatan Pajangan. Karena untuk membahas konflik secara menyeluruh tidak afdol kiranya untuk mengetahui secara detail konflik yang terjadi. Penjelasan menyeluruh terkait bagaimana type konflik yang terjadi akan sangat berpengaruh pada proses penyelesaiannya. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan menyoroiti bagaimana faktor-faktor pendorong perdamaian dapat terealisasi, serta akan menganalisis berbagai cara-cara yang digunakan dalam proses menanggapi perdamaian. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana langkah awal dari berbagai pihak dalam merekonstruksi berbagai sektor yang kiranya sangat penting untuk lebih dahulu direkonstruksi dalam masa pemulihan konflik.

B. Peace Making (Proses Penyelesaian Konflik melalui Musyawarah)

Setiap munculnya konflik selalu mengalami eskalasi hingga deskalasi pasang surut keadaan yang terjadi. Menurut para pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan agar tidak lagi terjadi timbunan permasalahan yang berakibat konflik semakin membesar dan dapat mengakibatkan korban jiwa maupun materi. Oleh karena itu, beberapa konflik yang pernah mendera Kecamatan Pajangan telah berada pada proses yang baik dalam menyelesaikan sebuah konflik.

Kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut, perwakilan dari pemerintah memiliki inisiatif untuk datang ke Kecamatan Pajangan untuk jemput bola, agar kesimpangsiuran di tengah masyarakat akan cepat terselesaikan. Dalam hal ini Camat, Kapolsek hingga Danramil pun dilibatkan dalam usaha pertama menanyakan sesungguhnya kegiatan apa yang kelompok ini lakukan, karena banyak laporan yang menganggap ada kegiatan melenceng dari apa yang dilakukan oleh kelompok ini yang tidak seperti syarat Islam umumnya. Berbagai kecurigaan yang berindikasi pada adanya niatan dari kelompok ini untuk merubah dasar Negara menjadi Syariat Islam (Chaidar:2008). Niatan awal yang cukup baik untuk menyelesaikan masalah dengan

cara negosiasi pun batal dijalankan karena ada penolakan dari pihak kelompok masyarakat. Bahkan dalam prosesnya awal negosiasi yang gagal dan adanya perlawanan dari kelompok masyarakat. Karena perlawanan yang dilakukan kelompok tersebut tidak dalam perkiraan pemerintah.

Kemudian dalam konflik yang melibatkan Kecamatan Pajangan dan Pemerintah, proses mewujudkan perdamaian dalam konflik vertical ini diperankan aktif oleh para tokoh ormas setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang merupakan unsur dari masyarakat. Sedangkan unsur pemerintahan menghadirkan Bupati, Sekretaris Daerah, dan anggota DPR juga hadir, dalam forum rapat guna merumuskan perwujudan perdamaian antar masyarakat Pajangan dan pemerintah. Pada akhirnya masyarakat akan menyerahkan sepenuhnya permasalahan yang terjadi untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. Tujuan Dari Proses Musyawarah

Tujuan utama dari proses musyawarah adalah membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mencari pemecahan masalah konflik yang mereka hadapi. Pemecahan ini harus memuaskan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, paling tidak hingga tingkat yang dapat diterima. Idealnya hasilnya lebih kuat dengan sendirinya dan untuk menjaganya tidak harus membutuhkan campur tangan pihak luar manapun. Dalam meraih tujuan-tujuan ini, musyawarah akan :

- 1) Membangun negosiasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah agar dapat menemukan titik solusi dan mencapai perdamaian yang jangka Panjang.
- 2) Membantu pihak-pihak yang bertikai mengurangi ketegangan dalam hubungan mereka.
- 3) Membantu pihak-pihak yang bertikai untuk menjelaskan permasalahan dengan lebih jelas.
- 4) Mencari akar konflik dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang bertikai.
- 5) Mewadahi dan memperjelas terhadap konflik yang terjadi.
- 6) Mendidik untuk menghadapi agar konflik bisa ditangani dengan bijaksana.
- 7) Menjaga dan membangun pihak-pihak agar tidak bertikai lagi.

2. Tahapan Proses Musyawarah

Mediation Aid-Memoire yang rinci ini disusun oleh Lester B. Pearson Canadian International peacekeeping Training Centre dan The Canadian International Institute Of Applied Negotiation (1997) memberikan tinjauan luas mengenai tahapan-tahapan proses mediasi yang sangat berguna.

1. Mempasilitasi pertemuan:
 - a) Mencari pihak yang bertikai.
 - b) Memanggil pihak yang bertikai.
 - c) Mempetakan proses.
 - d) Mengundang pihak-pihak yang bertikai.
 - e) Membuat undangan agar bisa diterima oleh pihak yang bertikai.
 - f) Menetapkan tempat pertemuan dengan kedua belah pihak.
2. Membuat rancangan negosiasi:
 - a) Mencari mediator yang netral terhadap keputusan.
 - b) Negosiasi dilakukan dengan tatap muka.
 - c) Menjaga kekhawatiran dan kepentingan yang akan dihadapi.
 - d) Menjaga kesepakatan bersama yang diraih.
 - e) Menyimpulkan perselisihan yang diakui.
3. Menjalankan hasil yang disepakati.:
 - a) Semua pihak menjaga kesepakatan.
 - b) Mencari solusi yang belum terpecahkan di forum lain.
 - c) Tatacara pemecahan perselisihan yang disetujui.
4. Menyiapkan persiapan:
 - a) Menemui pihak-pihak yang bertika secara terpisah.dan menjelaskan peranan anda dan proses mediasi.
 - b) Menjaga kepercayaan mereka dengan baik terhadap proses yang akan berlangsung.
 - c) Kenetralan tempat sebagai poin yang penting.
 - d) Membuat aturan konsultasi untuk merumuskan pertikaian.
 - e) Menjaga kepentingan mereka yang bertikai dalam memecahkan permasalahan mereka.

Hasil dari musyawarah dapat disimpulkan beberapa poin yaitu :

1. Kami akan selalu menjaga persatuan dan kesatuan.
2. Kami tidak akan membeda-bedakan suku, golongan, dan agama
3. Kami akan selalu menjaga keamanan dan kemyamanan Kecamatan Pajangan.

4. Kami sepakat bahwa di masa yang akan datang tidak akan melakukan aksi yang mencidraai demokrasi di Kecamatan Pajangan dan akan kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan tokoh masyarakat Pajangan.
5. Pemerintah siap di ajak musyawarah apa bila ada kebijakan tidak sesuai di masyarakat, baik itu berkaitan sosial, ekonomi dan pendidikan.



Gambar 5. 6 Mediasi Ormas FJI, Masyarakat Pajangan dengan perwakilan pemerintah Bantul

Lebih jelas lagi bukti kesepakatan damai yang disepakati oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh pihak yang berwajib, banyak point penting yang menjadi titik paling penting dalam melihat interaksi masyarakat dan pemerintah kedepannya. Oleh karena itu, perlu adanya peran peran lebih besar dari berbagai pihak guna untuk memberikan dorongan, bimbingan maupun pengawasan terutama dari pihak-pihak yang menjadi saksi-saksi ataupun yang paling berperan dan memiliki pengaruh dalam proses perjanjian yang telah disepakati. Maka dari itu, selanjutnya akan dibahas lebih rinci bagaimana masing-masing peran perorangan atau institusi dalam proses

konflik, mulai dari konflik muncul hingga perjanjian terealisasi, kemudian juga tidak melupakan aktor-aktor setelah proses perdamaian dilakukan, khususnya dalam proses menjaga perdamaian dikemudian hari, hingga tahap pembangunan perdamaian dilaksanakan.

Proses panjang hingga mencapai suatu kesepakatan damai dengan 5 point perjanjian tertulis mengalami pasang surut dan tarik ulur yang dilakukan oleh banyak pihak, sehingga apapun yang dihasilkan dalam perjanjian tersebut merupakan suatu intisari dari apa yang telah menyebabkan suatu konflik dapat terjadi dan dirasa perjanjian tersebut dikemudian hari tidak akan timbul lagi dipermukaan. Meskipun terdapat berbagai perdebatan yang cukup alot dan sengit, tapi disini dapat dilihat dalam suatu keadaan panas masih ada titik baik dari semua masyarakat yang ikut ambil bagian pada proses perdamaian, mereka mengedepankan budaya musyawarah untuk segera merealisasikan perdamaian yang dituntut untuk segera terwujud, namun, disamping itu segala macam yang dibuat harus tetap mengacu pada semua kepentingan masyarakat, tidak hanya salah satu pihak saja yang merasa diuntungkan. Proses perdamaian, hingga pasca konflik terjadi, membutuhkan kerja keras dari banyak pihak, namun perlu dicermati segala usaha dan daya juang guna mewujudkan perdamaian juga harus dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah melihat dari aspek nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat. Dalam konteks penelitian ini menemukan perwujudan perdamaian dari konflik Kecamatan Pajangan ini menggunakan perspektif nilai-nilai luhur kebudayaan dan kondisi masyarakat setempat. Sehingga musyawarah yang memang pada tujuan awalnya sebagai wadah untuk masyarakat menyalurkan segala macam keluhannya dapat diterima dan diakomodasi dalam suatu perjanjian damai.

Perjanjian yang telah terwujud dengan mengacu pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, diharapkan kedepannya akan menjadi suatu acuan apabila terdapat friksi-friksi yang melibatkan Kecamatan Pajangan, karena diharapkan setelah ini akan terwujud suatu hubungan yang baik. Hubungan yang erat akan menjadikan hubungan dari kelompok masyarakat dan pemerintah yang berseteru akan semakin

membalik. Oleh karena itu, dalam konflik yang terjadi di Kecamatan Pajangan ini justru diharapkan kedepannya akan membawa dampak positif, selain kerugian yang telah dialami pada saat konflik terjadi, saat ini coba melihat dari sisi yang berbeda, masyarakat akan berusaha merubah hal yang besar, dari hal konflik yang sebelumnya hanya bersifat merugikan akan ditransformasikan ke arah yang positif, sesuai dengan apa yang dikatakan Lewis Coser konflik mengarah ke perubahan, tapi juga bisa positif bagi kelompok. Konsekuensi positif konflik meliputi menetapkan karakter anggota kelompoknya, menetapkan identitas kelompok, mempertahankan stabilitas dan meningkatkan kohesi (kerekatan) masyarakat.

Pasca terealisasinya ikrar perjanjian damai masyarakat Pajangan dan Pemerintah yang didasarkan pada banyak aspek terkait agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.

Penyelesaian konflik yang mengedepankan musyawarah dan dengan tidak melupakan masalah pokok yang menjadi penyebab terkait adanya masalah kriminalitas. Dengan adanya musyawarah yang dilakukan berbagai pihak dan pada akhirnya melahirkan point-point kesepakatan. Pada dasarnya awal musyawarah yang dilakukan tidak berbeda jauh dengan pedoman penyelesaian konflik melewati jalur non litigasi penyelesaian konflik, dengan cara ini mengedepankan penyelesaian konflik tanpa menggunakan jalur peradilan, karena salah satu usaha dilakukan untuk merealisasikan perdamaian dengan cara mengedepankan nilai-nilai lokal yang ada di tengah masyarakat.

Proses yang hampir salam dalam konteks konflik yang melibatkan Kecamatan Pajangan. Dimana proses perjanjian damai melalui negosiasi antar beberapa pihak menghasilkan point-point perjanjian damai yang disepakati bersama antar masyarakat Pajangan dan Pemerintah setempat.

Walaupun akhirnya perjanjian damai terealisasi, proses yang dilakukan cenderung cukup lama dan berbelit-belit, butuh waktu lebih lama dari tiga bulan, sehingga segala kerugian yang disebabkan oleh konflik akan sesegera mungkin hilang.

1. Mediasi

Penyelesaian konflik dengan jalur non litigasi dikedepankan dalam hal memberikan efek yang baik di tengah masyarakat, karena pertimbangan situasi yang mungkin dapat sewaktu-waktu memanas lagi, sehingga musyawarah menjadi satu jalan yang terbaik dikedepankan. Dalam proses musyawarah yang terus berjalan ada banyak aktor yang tidak boleh dilupakan yang memiliki andil dalam terwujudnya proses perwujudan perdamaian. Dalam hal ini para aktor yang dimaksud memiliki andil sebagai mediator konflik. Aktor-aktor yang memiliki peran dalam memediasi kedua kelompok agar cepat berdamai merupakan aktor yang berasal dari ranah negara, seperti Bupati, tokoh Masyarakat, Polsek, Kodim, anggota DPR dll.

Para aktor yang menjadi juru damai tentu memiliki tanggung jawab dalam hal menciptakan suasana damai yang ada di Kecamatan Pajangan. Pada dasarnya, mediasi yang dilakukan merupakan salah satu faktor penting yang akhirnya mewujudkan perjanjian damai. Mengapa dikatakan seperti itu, keadaan yang cenderung belum stabil dari kelompok masyarakat membutuhkan aktor-aktor netral yang dapat menjadi penengah dari apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang berseteru, dan yang menjadi nilai plus dari pihak-pihak yang menjadi mediator merupakan pihak netral yang hadir karena tanggung jawab mereka sebagai pemangku kekuasaan yang berkewajiban menyelesaikan setiap masalah yang ada di tengah mereka.

Pihak ketiga yang menjadi mediator berfokus pada tugas mereka menjadi fasilitator yang hanya memberikan masukan dan arahan agar semua dapat kembali ke keadaan seperti semula. Pihak ketiga yang lebih banyak berasal dari negara memberikan arahan dan masukan terkait tentang bagaimana point-point perdamaian dapat terealisasi dengan mudah dan tentu dapat mengakomodir kepentingan semua pihak. Hampir semua aktor memiliki kepentingan yang sama, dan dapat dipastikan tidak ada aktor-aktor yang mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi. Wakil negara yang menjadi mediator dalam konflik ini merupakan sukarelawan, dan hal tersebut berpengaruh pada penerimaan kelompok yang hadir ditengah mereka, karena

itu dapat dipastikan bahwa mediator yang hadir ditengah kelompok masyarakat dapat diterima oleh pihak Pemerintah, dalam hal tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mediator (Fisher,2001:117)

Peran mediator dalam suatu konflik sudah jelas, bertugas untuk memandu dan mengawasi jalannya negosiasi antara kelompok masyarakat dan tentu memberikan masukan-masukan yang sangat berguna, masukan yang dimaksud tentu tidak asal dikeluarkan, harus berdasarkan apa yang dibutuhkan dan berdasar pengalaman-pengalaman dan berkompeten untuk menjadi mediator dalam konflik yang muncul di Kecamatan Pajangan.

2. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi yang dilakukan pasca konflik terbuka merupakan salah satu cara yang dikedepankan dalam proses menciptakan suatu perdamaian, cara rekonsiliasi yang dikedepankan dalam salah satu konflik di kecamatan Pajangan , dianggap sebagai langkah yang paling tepat, ketika perselisihan anatara negara dan masyarakat terjadi. Rekonsiliasi yang dikumandangkan dalam proses perdamaian pada konflik di Kecamatan Pajangan merupakan salah satu cara yang dianggap tepat, kejadian yang sudah terjadi hampir satu tahun lalu masih menyisakan permasalahan dibalikinya, belum terselesaikannya permasalahan secara menyeluruh menuntut semua pihak untuk sesegera mungkin menyelesaikannya.

3. Coercive

Walaupun pada akhirnya perdamaian sudah selesai terealisasi butuh proses panjang sebelum berakhir indah, ketegangan-ketegangan, tekanan, hingga perlu kiranya untuk memberikan tekanan-tekanan dan intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Karena pada dasarnya pihak-pihak tersebut memiliki hak untuk melakukan intervensi, seperti pemerintah, pihak berwajib dll. Dalam hal ini pemerintah mepergunakan kapasitasnya sebagai pihak yang berwenang, mereka menggunakan cara *coercive* untuk mengendalikan konflik yang sedang berlangsung,

dalam hal ini *coercive* berarti pemerintah melakukan kebijakan intervensi sebagai upaya untuk mengendalikan konflik dengan pemaksaan secara fisik (Wirawan:2010).

Penggunaan cara *coercive* guna menghentikan konflik memang tidak dilakukan pada situasi genting, ketika himbauan yang telah dilakukan berulang-ulang tidak diindahkan. Atas dasar pertimbangan guna menyelamatkan aspek yang lebih besar, pemerintah dalam hal ini kepolisian melakukan perdamaian, maka dari itu tindakan represifpun dilakukan, dalam hal ini paksaan dan kekerasan tidak dilakukan pada situasi negosiasi. Pemaksaan untuk menghentikan konflik dilakukan di lapangan, dalam keadaan tegang dan siap demo. Dalam kondisi siaga tersebut akhirnya ada instruksi dari Kapolsek Kecamatan Pajangan, untuk menindak ketika semua keadaan sudah tidak dapat dikendalikan. Dipandang dari banyak aspek, upaya *coercive* yang dilakukan memang tidak terlalu dapat diterima oleh masyarakat umum, dalam hal menghentikan suatu konflik, apabila negara lunak terhadap suatu kelompok, justru konflik akan sulit dan akan memakan waktu lama untuk menyelesaikannya.

Secara garis besar semua strategi penyelesaian konflik diterapkan dalam kasus konflik antar masyarakat Pajangan dengan pemerintah Bantul yang terjadi di Kecamatan Pajangan, mulai dari *coercive*, non Litigasi, hampir semua bentuk perwujudan perdamaian yang sudah dilakukan dengan berbagai macam cara, tentu dengan intensitas dan penggunaan cara di ranah yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam setiap penanggulangan suatu konflik. Keberhasilan dapat dikatakan sudah terlihat ketika perdamaian dapat dengan cepat terealisasi, walaupun masih banyak tuntutan ataupun tekanan dari berbagai pihak.

Setelah kesepakatan damai terealisasi, tentu tahap selanjutnya adalah bagaimana melihat keadaan masyarakat dari sisi kondisi atau dampak yang telah dialami, karena rekonstruksi awal pasca konflik usai merupakan elemen penting dari tahap yang lebih panjang kedepannya. Walaupun rekonstruksi konflik merupakan langkah sementara yang dapat dikatakan cepat, namun tahap ini merupakan salah satu

tahap penunjang untuk berhasil tidaknya dalam penerpan konsep-konsep aplikatif dalam mewujudkan perdamaian jangka panjang.

Penyelesaian konflik dengan menggunakan jalur litigasi memang sudah jarang sekali diterapkan di era demokratisasi ini, para stakeholders lebih dulu mengedepankan cara negoisasi dan mediasi sebagai garda terdepan dalam proses terwujudnya perdamaian. Namun, berbeda bila dibandingkan dengan era otoriter dahulu, segala perbuatan yang dianggap melawan ataupun mengganggu kestabilan negara akan dihukum dengan pidana, walaupun kadang kala hukuman yang diterapkan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

4. Rekonstruksi Darurat Konflik

Pasca konflik terjadi tentu banyak perubahan-perubahan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, keadaan masyarakat yang awal mulanya baik-baik saja dan segala sektor kehidupan dapat berjalan sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing. Namun bila dilihat dengan seksama apa yang terjadi pasca konflik, semua dapat kembali seperti semula dan semuanya dapat beradaptasi pada tatanan sosial yang sedikit atau banyak akan berubah dari masa sebelumnya. Rekonstruksi awal ini merupakan salah satu tahap langkah awal dan krusial guna dalam mengapai tahap yang lebih jauh yaitu peace building. Terutama merekonstruksi keadaan masyarakat dari sektor ekonomi, psikologis masyarakat ataupun sosial politik Nicole dalam (Crocker, 2001:723). Karena tidak dapat dipungkiri sektor-sektor sentral tersebut akan berubah ketika muncul konflik di tengah masyarakat. Tidak terkecuali dengan peraturan yang ada di Indonesia, terutama yang diadopsikan dalam untuk mengatur dan bahan acuan dalam rekonstruksi pasca konflik. Aturan tersebut tertuang dalam PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 11 TAHUN 2008.

Dalam peraturan tersebut diatur beberapa aspek yang khusus diperuntukkan guna mewujudkan rekonstruksi pasca konflik .

Tabel 5. 1 Indikator Pencapaian Rekonstruksi Pasca Konflik

Aspek	Indikator Capaian
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none">1. terselenggaranya kegiatan produksi dan distribusi barang-barang2. Terselenggaranya transaksi ekonomi baik di pasar maupun diluar pasar, baik perorangan maupun lembaga.3. Meningkatnya mjumlah produksi dan distribusi barang-barang bernilai ekonomi baik perorangan maupun lembaga.4. Meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan atau lembaga ekonomi yang terlibat dalam kegiatan produksi dan distribusi barang-barang ekonomi
Psikologis	<ol style="list-style-type: none">1. Kembalinya kepercayaan dari masyarakat dalam menjalani hidup seperti semula.2. Menghilangkan efek traumatis kepada masyarakat.3. Fokus terhadap psikologis para pendemo akibat konflik

Fisik dan Sosil Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. 2. Berfungsinya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan 3. Meningkatnya jumlah peserta kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
-------------------------	--

Sumber : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 11 TAHUN 2008

Pada dasarnya masih banyak aspek yang dijadikan indikator/acuan sebagai fokus rekonstruksi pasca konflik, seperti pelayanan publik, aspek budaya, keamanan dan ketertiban. Namun ketiga aspek yang dijabarkan diatas, merupakan sektor yang intens direkonstruksi pada konteks konflik di Kecamatan Pajangan.

4. Rekonstruksi Sektor Ekonomi

Keadaan pasca konflik yang dapat terlihat mengalami dampak negatif dari terjadinya konflik adalah dari sektor ekonomi, dapat dikatakan seperti itu karena hampir dalam kurun beberapa hari, bahkan beberapa bulan masyarakat berada dalam posisi tidak dapat melakukan apapun, kecamatan seperti menjadi kecamatan mati yang tidak dapat bergerak dan berbuat apa-apa terutama dalam hal menjalankan roda ekonomi masyarakat. Rasa takut, rasa tegang dan rasa cemas terus menghantui masyarakat, dengan hal tersebut roda ekonomi hampir tidak berjalan berjalan.

Dirasa keadaan sudah mereda, dan keadaan kondusif telah terlahir, dengan adanya ikrar perjanjian perdamaian damai yang disetujui oleh masyarakat Pajangan dengan Pemerintah Bantul,

Untuk konteks, merekonstruksi keadaan darurat pasca konflik vertical di tengah masyarakat secara umum dapat berjalan sesuai dengan apa yang dijelaskan tersebut, tergantung dengan intensitas dan besar kecilnya konflik yang ada di tengah masyarakat. Bila dibandingkan dengan penanganan konflik yang bersifat horizontal

tentu hampir sama, bagaimana tujuan awal adalah rekonstruksi ekonomi, hanya bagaimana caranya saja yang berbeda dalam mengelola hal tersebut.

5. Rekonstruksi Fisik dan Sosial Politik

Keadaan sosial politik yang dapat dilihat dari berbagai peristiwa konflik yang terjadi di Kecamatan Pajangan saat ini tidaklah terlalu terlihat dari pasca kejadian yang telah terjadi sejak dahulu hingga saat ini. Bagaimana akan dilihat keadaan sosial politik di Kecamatan Pajangan, khususnya tiga konflik yang diangkat baik sebelum pada saat kejadian ataupun pasca konflik terjadi tidak berubah begitu signifikan, karena pada dasarnya hubungan interaksi sosial antara masyarakat Pajangan dan Pemerintah setempat, walaupun ada interaksi antar keduanya, hanya sebatas keperluan-keperluan tertentu seperti administrasi kecamatan dsb.

Kemudian tidak boleh dilupakan bagaimana rekonstruksi pasca konflik pada sektor sosial, tujuan utama dari rekonstruksi pada sektor sosial adalah mengembalikan hubungan pada saat konflik terjadi.

Pada dasarnya masyarakat dan pemerintah Bantul memiliki perbedaan pandangan terhadap pemilihan camat Pajangan, terutama bila berbicara terkait agama dan ras, maka dari itu strategi dari beberapa pihak untuk menghilangkan prasangka perbedaan yang menjadi jurang perbedaan terutama untuk mengatur mereka dalam hal interaksi,

Hal konkrit yang telah dilakukan untuk merekonstruksi keadaan sosial antara masyarakat dan Camat Pajangan, adalah dengan cara memanfaatkan momentum berbagai kegiatan yang sengaja dibuat dan ditujukan untuk masyarakat, ataupun kegiatan yang ada di tengah masyarakat dan dimanfaatkan oleh pihak berwenang untuk mensosialisasikan keadaan terkini antara kedua desa yang telah menyepakati perdamaian, contoh kegiatan konkrit mempertemukan masyarakat dan Camat Pajangan kedua hubungan sosial antar keduanya kembali pulih seperti semula. Pihak aparat berusaha mempertemukan kedua unsur masyarakat, terutama para pemangku adat ataupun para tokoh masyarakat, karena kunci perdamaian ada di

tangan mereka, program bersih-bersih kecamatan yang memanfaatkan moment hari kemerdekaan dan perpisahan Kapolsek seluruh masyarakat dan tokoh, pihak TNI dan pihak kepolisian, dan tidak lupa mengundang beberapa dari Dinas Kabupaten Bantul, dari apa yang dituju dari kegiatan ini adalah menanamkan nilai kebangsaan bagi masyarakat, dengan cara gotong royong, merayakan kemerdekaan, dan tentu dengan menerima semua orang dengan keadaan kultural dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Setelah beberapa program yang direncanakan oleh pihak-pihak pemerintahan ataupun Kodim dan Kapolsek sudah berjalan dengan baik dan sudah terlihat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat di Pajangan, karena terlihat semua keadaan sudah berjalan seperti biasa, sekolah sudah dipenuhi siswa, para petani sudah pergi menggarap ladang dan sawah mereka, pusat perekonomian meliputi pasar pun sudah berjalan seperti biasa tanpa membatasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan program Kecamatan Pajangan. Dengan berbagai wujud nyata apa yang telah tercapai pasca konflik terjadi telah menunjukkan bahwa rekonstruksi pasca konflik telah tercapai dengan baik, Rekonstruksi pasca konflik dapat berhasil tidak terlepas dari nilai lokal yang dimunculkan kembali pada saat perdamaian, dan hal tersebut salah satu kunci keberhasilan terciptanya perdamaian.

Ketika keadaan sosial sudah kembali seperti semula, rekonstruksi pasca konflik mungkin sudah pada tahap akhir, karena aspek lain seperti politik juga tidak terlalu berpengaruh dalam keadaan Kecamatan Pajangan, karena sumber daya produk di Kecamatan Pajangan tidak terlalu berpengaruh terhadap keadaan politik di Kabupaten Kabupaten Bantul, sehingga rekonstruksi terkait kehidupan politik mungkin hanya akan diberikan kepada pihak-pihak pemangku kekuasaan, terutama pemangku kekuasaan tokoh masyarakat dan kecamatan. Karena kepentingan-kepentingan relasi politik kemungkinan ada di tangan mereka, pentingnya tahap rekonstruksi awal pasca konflik sangat berpengaruh pada keadaan yang lebih lanjut, karena apa bila penanganan serta pemerintahan dengan tujuan pemulihan yang konstruktif akan menciptakan peluang munculnya bentuk interaksi yang baru dan

mencegah semakin kuatnya desintegrasi yang terjadi masa lalu (fisher, 2000:126), dengan demikian diharapkan setelah konflik berakhir dan rekonstruksi awal sudah berjalan dengan baik akan berdampak pada keadaan interaksi baru yang semakin membaik dari kelompok masyarakat yang berkonflik.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi pasca konflik sudah dilakukan dengan berbagai cara, namun dalam perjalanannya memang belum tercapai secara sempurna dalam mengembalikan keadaan masyarakat seperti sebelum konflik terjadi, tapi bisa dilihat bahwa usaha yang dilakukan sudah membawa keadaan masyarakat kearah yang sangat lebih baik. Oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah selanjutnya agar membuat langkah awal dalam perdamaian dapat berkorelasi dengan baik dengan langkah-langkah perdamaian yang akan diterapkan lebih lanjut, seperti salah satu contoh adalah dengan menerapkan nilai-nilai lokal dalam proses membangun perdamaian kedepan yang abadi.

C. Membangun Masyarakat Dalam Kebijakan Peace Keeping

Perdamaian merupakan suatu keadaan yang diidamkan dari setiap kehidupan masyarakat, terutama apabila melihat di beberapa daerah yang memiliki sejarah kelam tentang segregasi konflik yang sering terjadi. Perdamaian yang menjadi barang mewah di beberapa tempat harus benar-benar dijaga dan dipertahankan serta lebih jauh harus bisa bergerak dari sekedar menjaga sebuah perdamaian, menjadi sebuah transformasi yang diharapkan pada tujuan akhirnya akan menciptakan perdamaian abadi ditengah masyarakat.

Mewujudkan cita-cita besar dalam membangun suatu perdamaian jangka panjang pasti membutuhkan suatu rencana, implementasi, dan evaluasi yang cukup matang dan maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan yang komprehensif dan menyeluruh demi mewujudkan hal tersebut, mulai dari awal sejak proses penyusunan rencana/skenario ke depan hingga pada proses paling akhir bagaimana evaluasi dari setiap rencana yang telah diterapkan. Setiap program yang direncanakan harus mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Semua aspek bidang kehidupan harus

benar-benar dibenahi dan direkonstruksi, terutama terkait pemenuhan aspek dasar kehidupan masyarakat, seperti keamanan, kenyamanan, keadilan, dan pemetaan ekonomi. Ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, maka dipastikan masyarakat berada dalam keadaan baik, dan hal tersebut akan berdampak pada pola pikir masyarakat yang akan lebih banyak mengarah pada pola pikir positif dalam menghadapi suatu masalah, seperti dalam menghadapi setiap friksi yang datang dalam kehidupannya akan menyikapi lebih bijak dan konflik besar yang selama ini sering muncul akan tereduksi sedikit demi sedikit, dan hal tersebut harus dilihat oleh para pemangku kebijakan, bahwa semua konflik yang terjadi akibat dari kurang terpenuhinya setiap kebutuhan dasar dari kelompok masyarakat. Oleh karena itu tahap yang paling tepat untuk menghentikan semua konflik yang terjadi adalah memenuhi semua kebutuhan dasar masyarakat.

Bab V akan menjelaskan bagaimana proses menjaga sekaligus membangun suatu perdamaian, terutama bagaimana mengimplementasikan kesepakatan damai yang telah terwujud serta peran berbagai pihak dalam menjaga perdamaian. Pada tahap selanjutnya akan menganalisis berbagai tindakan yang telah dilakukan ataupun masih dalam rencana mewujudkan suatu pembangunan perdamaian jangka panjang, karena pada dasarnya *peace making* *peace keeping* serta *peace building* merupakan tahap yang komprehensif dan menyeluruh dan sebisa mungkin menyusun semua aspek dasar kehidupan dari masyarakat. Oleh karena itu, semuanya harus melibatkan semua pihak guna mendapatkan hasil yang maksimal.

1. Implementasi Perjanjian Damai Sebagai Langkah Awal

Setelah perjanjian damai disepakati dengan menghasilkan 5 point kesepakatan damai yang harus dijalankan dan diimplementasikan sebagai tindakan lanjutan dalam proses *peace keeping*. Karena pada dasarnya operasionalisasi *peace keeping* merupakan upaya lanjutan yang bertujuan untuk menerapkan segala macam perjanjian atau kesepakatan yang telah dihasilkan dalam proses *peace making*. Oleh karena itu kegiatan lanjutan ini harus benar-benar ditegakkan, dipantau dan terus

diawasi demi terus menjaga perdamaian tanpa menggunakan kekerasan (Fisher:2001).

Oleh karena itu, keberhasilan manajemen konflik guna menjaga perdamaian disaat kondisi yang masih rentan terjadi konflik di masa depannya. Dengan pertimbangan tersebut perlu dipikirkan formula yang paling tepat untuk mengimplementasikan hal tersebut, karena membangun perdamaian pada masyarakat yang heterogen suku dan agama membutuhkan penanganan secara holistik agar tidak berdampak pada konflik baru yang dapat menyengsarakan dan menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat dan Pemerintah mencoba menjaga dan mempertahankan perdamaian dengan mencoba melihat, bahwa konflik hanya sebuah keadaan masa lalu yang harus dilupakan guna manajemen konflik sebagai bagian tahap-tahap dan pelaksanaan perdamaian.

Sama halnya dengan apa yang terjadi di Kecamatan Pajangan, keadaan pasca konflik yang akan menyoroti implementasi konflik vertical yang pertama antara Negara dan Masyarakat. Ada upaya operasionalisasi dan implementasi dari ke 5 point perjanjian damai yang telah disepakati tersebut, guna terus menjaga perdamaian yang telah terwujud. Dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa, walaupun penyelesaian konflik yang dikedepankan lebih dominan dengan cara non litigasi dan mengedepankan musyawarah dan mediasi sebagai salah satu langkah dalam proses penyelesaiannya, tetap tidak dilupakan bagaimana penyelesaian masalah dari sisi yang lain, terutama permasalahan yang dianggap sebagai pemicu konflik.

Pentingnya menyelesaikan konflik tanpa melupakan masalah pendampingan merupakan langkah maju dari sebuah penyelesaian konflik di Kecamatan Pajangan khususnya, belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa konflik-konflik yang terjadi memang telah berhasil untuk diselesaikan, namun resolusi konflik yang dihadapkan belum diaplikasikan secara komprehensif dan masih menyisakan permasalahan-permasalahan pelik, sehingga peluang pengulangan konflik dengan berbagai penyebabnya sangat mungkin terjadi kembali. Namun dalam proses penyelesaian

konflik ini dengan tidak melupakan faktor lain dapat menjadi suatu harapan baru bagi masyarakat untuk benar-benar merasakan kedamaian.

Justru berbeda bila menyoroti perjanjian damai yang telah disepakati oleh Masyarakat dan Pemerintah “*kami akan selalu menjaga persatuan dan kesatuan*”, suatu kata-kata yang normatif dibangun dalam suatu perjanjian perdamaian. Suatu kata-kata simbolik yang tentu tidak terlalu pasti bagaimana harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena pada dasarnya masyarakat awam masih sangat butuh tuntunan yang terperinci untuk bagaimana dalam menjalankan hal tersebut, tidak hanya sebatas menuliskan kami akan menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu dalam point ini belum terlihat jelas bagaimana penerapan ditengah masyarakat. Walaupun dapat diakui bahwa persatuan setelah konflik berakhir tetap terjaga hingga saat ini.

Yang kemudian lagi terkait ikatan primordialisme yang masih cukup tinggi di Kecamatan Pajangan, terutama bila harus dihadapkan pada situasi-situasi panas semacam konflik yang melanda di Kecamatan Pajangan, isu Agama menjadi isu bawaan yang sanggup menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk terus berkonflik, maka penting dalam salah satu perjanjian damai, dan hal tersebut diwujudkan dalam point “*Kami tidak membedakan suku, golongan, dan agama*” . Tidak bisa dipungkiri dalam konflik antara Pemerintah dan Kecamatan Pajangan tidak bisa dihindarkan oleh isu perbedaan keyakinan, karena hal tersebut merupakan situs utama oleh para pihak-pihak untk memobilisasi masa guna kepentingan yang akan mereka tuju.

Menindaklanjuti hal tersebut, berbagai macam cara dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengimplementasikan suatu ide yang akan diterapkan dalam keadaan sehari-hari. Memang sulit untuk menyatukan perbedaan pola pikir terutama tentang perbedaan Agama di Kecamatan Pajangan, karena pandangan berbeda antara Agama satu dan Agama lainnya yang bergulir dalam kehidupan mereka.

Menyadarkan masyarakat akan pentingnya rasa aman memang sulit, mereka menginginkan rasa aman, tapi masyarakat tidak mendukung berbagai macam hal

program yang dibangun untuk mewujudkan hal tersebut, apabila dicermati lebih jauh, rasa aman merupakan kebutuhan fundamental bagi kehidupan manusia. Terciptanya rasa aman akan menentukan terpenuhinya kebutuhan dasar lain : kesejahteraan, kebebasan dan pengembangan identitas kultural. Lebih jauh menurut Johan Galtung dalam (Trijono, 21:2007) rasa aman atau tidaknya ancaman juga memberi peluang bagi kebebasan untuk bebas dari represi dan dominasi, lebih dari itu rasa aman juga akan memungkinkan manusia mengembangkan identitas kulturalnya secara optimal. Oleh karena itu, karena pentingnya terus menjaga rasa aman, perlu adanya kepedulian dan kesadaran dari semua pihak untuk mewujudkan ini semua.

Dalam hal ini, pihak yang berwajib terus memberikan perhatian khusus dalam proses menjaga keamanan dan kenyamanan di tengah masyarakat, memaksimalkan peran Babinsa dan Babinkamtibmas dalam pengawasan di tengah masyarakat, dengan harapan walaupun minimalnya petugas kepolisian yang ada, diharapkan akan terus dapat menjaga eksistensi di tengah masyarakat dan paling tidak untuk memberikan rasa aman ketika ada petugas kepolisian ataupun tentara yang ada di tengah mereka, selain dampak akan rasa aman dan terlindunginya masyarakat, hal tersebut akan memperbaiki citra polisi ditengah masyarakat, karena selama ini kepolisian dipandang sebelah mata ketika tidak dapat menyelesaikan kasus-kasus yang mengganggu keamanan masyarakat dan hal tersebut berdampak pada perilaku masyarakat apabila mendapati adanya kriminalitas di tengah mereka, mereka akan menyelesaikan hal tersebut dengan cara mereka tanpa mempertimbangkan hukum yang ada.

Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan maupun kepolisian memang sedikit sulit, seiring merosotnya citra mereka di tengah masyarakat, hal tersebut memang bukan tanpa sebab karena institusi yang seharusnya menjadi tumpuan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan justru menjadi institusi yang jauh dan memiliki jarak (gap) dengan masyarakat, ketika kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara baik pemerintahan ataupun kepolisian akan merubah budaya masyarakat yang sebelumnya enggan

berhadapan dengan kepolisian sekarang harus dan wajib untuk berinteraksi dengan pihak kepolisian, terutama setelah apa yang disepakati antar Masyarakat dan Pemerintah bahwa “Kami tidak akan membeda-bedakan suku, golongan, dan agama”.

Seakan menjadi trend dalam sebuah point perjanjian damai bahwa ketiga point tersebut menjadi point yang sama dituliskan dalam ikrar perjanjian damai di Kecamatan Pajangan, sehingga dapat dipastikan bahwa ketiga point tersebut merupakan point yang sangat normatif dalam penentuan point-point ikrar perjanjian damai selama ini. Namun, dalam konflik anatar Masyarakat dan Pemerintah ada sedikit perbedaan dalam point terakhir yang dimasukkan dalam point perjanjian.

Ketika berbicara terkait terwujudnya perjanjian damai antara Masyarakat dan Pemerintah, tidak bisa dilepaskan dari hal menarik terkait point terakhir yang masuk sebagai salah satu kesepakatan dimana terdapat nilai budaya lokal Pajangan sebagai salah satu point penting perdamaian yang berbunyi “*Kami akan menjalin tali persaudaraan*” antara Masyarakat dengan Camat Pajangan”.

Membangun nilai persaudaraan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kedua desa untuk menjaga perdamaian. Pada dasarnya penyelesaian konflik dengan menggunakan aras lokal ataupun nilai-nilai lokal sudah mulai dipertimbangkan pemaksimalannya saat ini, karena di beberapa tempat hal tersebut cukup efektif untuk memutus rantai konflik yang bersifat laten. Karena, ketika proses fasilitasi juga harus menghormati dan menghargai prakarsa, kebutuhan, kepemilikan dan legitimasi lokal, untuk menumbuhkan kapasitas lokal untuk perdamaian (local capacity for peace), (Trijono, 2007:66)

Proses implementasi nilai persaudaraan dalam kehidupan masyarakat pasca konflik memang masih terlihat canggung, roda panas yang tercermin dari kondisi Masyarakat masih terlihat, oleh karena itu pada proses membangun persaudaraan ini terdapat fasilitator yang selalu ada di tengah masyarakat. Pihak adat kecamatan ada suatu perayaan ketika mengangkat seseorang atau kelompok menjadi saudara dan hal tersebut menjadi salah satu langkah awal dari proses panjang menuju perdamaian

abadi, perayaan ceremonial tersebut digagas oleh masyarakat adat Pajangan, dan pada acara puncaknya mengundang perwakilan tokoh masyarakat dari Kecamatan Pajangan untuk secara simbolik diterima sebagai saudara masyarakat Pajangan, dan pada moment tersebut disaksikan oleh beberapa perwakilan dari pihak pemerintah Bantul, Kanit Intel dll.

Banyak kegiatan di kemudian hari yang digagas oleh pihak-pihak dari pemerintah untuk semakin mempererat tali persaudaraan antar Masyarakat dan Camat Pajangan tersebut. Seperti apa yang dilakukan pihak Kodim melakukan kegiatan bersih-bersih Kecamatan. Persaudaraan yang erat akan menjadikan hubungan dari Masyarakat dan Camat Pajangan yang berseteru akan semakin membaik. Oleh karena itu, dalam konflik yang terjadi di Kecamatan Pajangan ini justru diharapkan kedepannya akan membawa dampak positif, saat ini coba melihat dari sisi yang berbeda, masyarakat akan berusaha merubah hal yang besar, dari hal konflik yang sebelumnya hanya bersifat merugikan akan ditransmormasikan ke arah yang positif, sesuai dengan apa yang dikatakan Lewis Conser konflik mengarah ke perubahan, tapi juga bisa positif bagi Masyarakat. Konsekuensi positif konflik meliputi menetapkan karakter Masyarakat, menetapkan identitas Masyarakat, mempertahankan stabilitas dan meningkatkan kohesi (kerekatan) masyarakat.

Kerekatan yang dimaksud oleh Coser disini, juga terlihat dalam proses pasca konflik yang telah terjadi di Pajangan tersebut, saat ini sudah tidak ada lagi rasa trauma yang dapat dilihat dari Masyarakat, seperti apa yang dikatakan oleh bapak Yulius Suharta selaku Camat Pajangan.

“setelah perdamaian terjadi, keadaan sosial ekonomi masyarakat Pajangan sudah berjalan seperti biasa, seperti sudah melupakan apa yang telah terjadi”(Wawancara Mei 2017)

Penanganan permasalahan pasca konflik antar Masyarakat dan Kecamatan Pajangan di Kabupaten Bantul, dengan mengedepankan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh kedua belah pihak, secara tidak langsung akan mempengaruhi proses berfikir masyarakat, dengan berpatokan pada nilai-nilai luhur yang dipegang teguh

oleh masyarakat, dengan harapan akan memaksimalkan nilai-nilai asli adat Pajangan dapat lebih diterima oleh masyarakat, terutama dalam proses perdamaian, sehingga upaya rekonstruksi pasca konflik akan terealisasi dan akan menghindari konflik baru yang akan muncul.

Ciri khas menciptakan perdamaian di Kecamatan Pajangan dalam hal ini konflik yang bersifat vertikal akan memunculkan suatu perjanjian damai, yang bila dicermati dengan seksama, dari dua perjanjian damai yang telah dibuat, dari segi konten tidak terlalu berbeda banyak dan signifikan, hanya terdapat point-point normatif yang dimasukkan dalam isi perjanjian damai. Oleh karena itu, kemungkinan besar reproduksi konflik yang terus muncul diakibatkan oleh perjanjian damai ataupun implementasi yang dilakukan masih normatif.

2. Peran Berbagai Pihak Demi Menjaga Perdamaian Pasca Konflik

Menjaga perdamaian pasca konflik merupakan pekerjaan berat yang kedepannya harus dilakukan oleh semua pihak, karena keadaan rentan konflik justru berpeluang pasca perdamaian yang telah disepakati. Keadaan pasca konflik yang dikatakan rentan, menimbulkan pertanyaan, kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya, siklus konflik yang pada akhirnya telah sampai pada tahap perdamaian dan pasca konflik, justru dapat berbalik ke dalam situasi panas lagi dan terjebak ke dalam keadaan pra konflik kembali. Maka dari itu, keadaan rentan akan kembali munculnya konflik justru biasanya terjadi pasca perdamaian telah disepakati.

Dalam proses menjaga perdamaian, merupakan tahap lanjutan pasca ikrar perdamaian terealisasi. Oleh karena itu, dalam proses ini harus tetap berpedoman pada ikrar perdamaian yang telah tercapai. Namun, perubahan besar belum terlihat bila dilihat dari keadaan di Kecamatan Pajangan saat ini, terutama apabila berharap pada tataran membangun institusi atau lembaga khusus yang bekerja untuk menjaga perdamaian secara khusus. Dalam perjalanannya masyarakat hanya memaksimalkan lembaga-lembaga yang sudah ada, dengan program yang sudah ada, seperti bagaimana implementasi berbagai nilai budaya lokal dalam proses menjaga perdamaian dan

dengan memaksimalkan peran berbagai lembaga, seperti lembaga adat, lembaga agama serta lembaga pengamanan, seperti Kodim dan Kapolres dan lembaga pemerintahan setempat.

a. Tokok Adat dan Masyarakat

Tokoh adat merupakan salah satu unsur paling sentral ditengah kehidupan masyarakat, terutama masyarakat adat Pajangan. Ketika tokoh adat sudah memberikan rekomendasi terhadap suatu permasalahan maka akan lebih dipertimbangkan daripada pihak lain, walaupun pemberi rekomendasi berasal dari pemerintahan ataupun pihak-pihak yang berwajib. Berbeda dengan nilai adat lokal yang sudah mulai dilupakan dan ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri justru melalui moment konflik ini akan dilihat bagaimana ada usaha penguatan kembali nilai lokal sebagai instrumen dalam menjaga perdamaian.



Gambar 5. 7 Bupati, TNI, Polsek dan tokoh Masyarakat Pajangan.

Oleh karena itu melihat akan strategisnya peran dari tokoh adat di tengah masyarakat, pihak-pihak dari pemerintah maupun kepolisian melakukan pendekatan terhadap tokoh adat dan tokoh masyarakat adat Pajangan. Pendekatan yang dilakukan terhadap tokoh adat Pajangan membawa dampak positif terhadap penyelesaian konflik Kecamatan Pajangan, terutama konflik yang menyeret unsur keagamaan di dalamnya,

konflik dengan cepat diselesaikan dan dicari solusi terbaik demi kepentingan bersama. Dalam hal ini perlu dicermati kenapa peran tokoh adat masih sangat strategis ditengah modernitas kehidupan masyarakat, hampir sama bila dibandingkan dengan daerah-daerah dengan kultural yang masih kental, seperti Papua, Maluku, Aceh dsb. Dimana tokoh adat masih dianggap penting dalam pengambilan suatu keputusan.

Tokoh adat ditengah masyarakat Pajangan terlihat memiliki peran lebih daripada masyarakat jawa, terutama dalam mendorong atau menjaga perdamaian diantara kedua desa tersebut, mengapa hal tersebut terjadi karena masyarakat adat Pajangan yang merupakan kelompok utama yang dituju untuk diredam emosinya agar tidak melakukan hal-hal negatif yang kedepannya dapat muncul kembali. Selain itu, pertimbangan kenapa melakukan pendekatan yang extra terhadap adat masyarakat Pajangan,

Lembaga adat yang sebelumnya sudah lama tidak berfungsi bahkan dapat dikatakan hilang, coba dihidupkan lagi dan dimaksimalkan perannya. Masyarakat adat terutama dari pihak adat Pajangan cukup dibilang menjadi pihak yang berperan aktif dalam menggalang dan menjaga perdamaian pada saat konflik ataupun pasca konflik terjadi, tokoh adat yang adapun merupakan pihak pertama yang coba didekati oleh pihak pemerintahan, karena melihat pentingnya dan strategisnya lembaga adat di tengah masyarakat Pajangan. Karena dipercaya lembaga adat lebih dapat diterima oleh masyarakat setempat. Pasca konflik berangsur, peran lembaga adat tetap terlihat terutama sebagai fasilitator komunikasi antara pemerintah dan pihak Kecamatan. Lembaga adat coba didesak untuk mencoba mengembalikan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat Pajangan. Karena selama ini nilai-nilai tersebut seperti hilang dan berusaha dihidupkan kembali sebagai salah satu nilai budaya yang dapat menjaga perdamaian kedepannya. Dukungan akan mengembalikan semangat nilai-nilai lokal juga sudah tercermin dari visi dan misi Kecamatan Pajangan dengan salah satu tujuannya melestarikan adat Pajangan yang sejatinya harus selalu dijaga.

Tokoh adat di Kecamatan Pajangan memiliki peran tersendiri yang dilihat sangat besar terutama dalam mewujudkan perdamaian diantara desa yang berkonflik, dan tahap selanjutnya mempertahankan menjaga perdamaian itu agar tetap utuh. Peran strategis tokoh adat tetap dihadirkan hingga saat ini. Hal tersebut dapat terlihat dari salah satu narasumber yaitu pihak Intel Polres Kecamatan Pajangan mengatakan bahwa :

“pada awal ada indikasi konflik yang muncul kami langsung bergerak untuk mengumpulkan banyak pihak, terutama para tokoh adat dan tokoh masyarakat yang ada Kecamatan Pajangan dan Pemerintah Bantul, kami mengumpulkan mereka semua di Polres, untuk membicarakan solusi yang tepat untuk masalah ini, kami memiliki pertimbangan bahwa ketika tokoh adat dikumpulkan, akan lebih mudah mengkondisikan keadaan” (Wawancara Mei 2017)

Ada inisiatif untuk menghidupkan kembali dan memberi porsi yang lebih besar kepada tokoh adat dan masyarakat untuk berperan aktif dalam hal menjaga perdamaian. Peran tokoh adat yang seharusnya signifikan terutama pasca konflik terjadi, justru tidak terlalu signifikan, apabila dibandingkan pada saat konflik terjadi terutama dalam perumusan perdamaian, pada saat ini tokoh adat terkesan hanya bersinergi terhadap penduduk yang ada di Kecamatan Pajangan,

Selain tokoh adat yang berperan besar dalam hal menjaga perdamaian, tidak boleh dikesampingkan juga bagaimana peran dari masyarakat sipil guna mempertahankan perdamaian, karena kunci dari semua itu adalah bagaimana masyarakat sipil dapat terkonsolidasi dengan baik, cara masyarakat untuk menjaga perdamaian pasca konflik terlihat pada acara-acara yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Masyarakat Pajangan tersebut sudah sepakat untuk berdamai dan bersaudara dan dibingkai dalam nilai lokal *“seangkanan”*,

Dari apa yang dikemukakan oleh informan dapat dilihat bahwa dalam tatanan sosial masyarakat dengan aktivitas kemasyarakatan yang dilaksanakan dalam proses perdamaian diantara masyarakat Pajangan menunjukkan fakta bahwa telah adanya

peningkatan interaksi assosiatif diantara Masyarakat. Namun dibalik itu, perlu dilihat lebih jauh bahwa kerukunan yang terlihat pada kegiatan kebersamaan dalam acara Kemerdekaan, gotog royong dll, dan hal tersebut hanya sebatas seremonial tertentu saja, dan tidak ada kegiatan yang benar-benar memperlihatkan keadaan Masyarakat Pajangan yang berbeda Agama ini sudah pada tahap yang lebih jauh dan dapat dipertahankan dan menjadi rujukan daerah lain yang mengalami persoalan yang sama dengan apa yang mereka alami.

b. Koramil Kecamatan Pajangan

Selain fungsi dan peran tokoh adat ataupun masyarakat dalam hal menjaga perdamaian, lebih lanjut lagi akan melihat bagaimana peran besar yang dimainkan oleh pihak berwajib yaitu Koramil dan Polsek. Peran kedua intitusi terlihat menonjol ketika pasca konflik terjadi, terutama peran Koramil dalam rekonstruksi pasca konflik terjadi. Kodim Kecamatan Pajangan merupakan satuan tugas Koramil yang membawahi Kecamatan Pajangan, yaitu meliputi kabupaten Bantul, oleh karena itu apapun yang terjadi, terutama terkait ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan daerah merupakan tanggung jawab Kodim Kabupaten Bantul. Dalam konteks konflik yang terjadi di Kecamatan Pajangan secara garis besar tugas dari aparat Koramil pada awalnya hanya sebatas sebagai pihak pengaman konflik agar tidak membesar, tapi dalam perjalanannya pihak Koramil justru menjadi salah satu aktor yang berperan strategi dalam mencegah konflik agar tidak membesar. Lebih dari itu, pihak aparat Koramil menjadi salah satu pihak yang memberikan ketenangan ataupun perdamaian pada saat konflik ataupun pasca konflik, terutama dalam tahap pemulihan pasca konflik.

Dari apa yang dijelaskan di atas bahwa target pertama untuk merekonstruksi keadaan masyarakat dari berbagai sudut kehidupan masyarakat secara umum sudah terlaksana dengan baik, dengan bukti bahwa setelah sepuluh hari setelah konflik

terjadi, kehidupan masyarakat sudah kembali seperti semula, langkah berikutnya adalah menjaga perdamaian.

Sesungguhnya menjaga perdamaian merupakan tugas pokok Koramil, oleh karena itu, tidak terlalu adanya treatment-treatment khusus yang dilakukan oleh pihak berwajib, seperti kewajiban pertama adalah menjaga teritorial mereka agar tetap aman dan nyaman, walaupun dalam hal teritorial yang dimiliki oleh Koramil cukup luas, yaitu meliputi kabupaten Bantul, namun semuanya harus dilakukan dengan maksimal, maka dari itu Kodim mencoba memaksimalkan unit-unit yang lebih kecil, dalam hal ini adalah Koramil. Koramil yang dinaungi oleh Kodim letaknya hampir tersebar di seluruh kecamatan, dengan adanya Koramil di setiap kecamatan maka institusi tersebut merupakan perpanjangan tangan pertama dari pihak Koramil yang langsung menjangkau masyarakat, lebih jauh lagi Koramil berusaha lebih spesifik menjaga perdamaian pada tataran desa, dengan adanya Babinsa yang ada di tengah masyarakat desa, tugas pokok babinsa di tingkat desa adalah sebagai pihak yang mengkoordinir sistem keamanan di desa agar tetap berjalan, kemudian Babinsa juga menjadi pihak yang bertanggung jawab ketika adanya friksi-friksi yang ada di tengah masyarakat.

Babinsa yang bertugas membina masyarakat desa, memiliki trik tertentu agar tugas mereka terkesan tidak terlalu eksklusif di tengah masyarakat. Babinsa diarahkan agar mereka dapat bersatu dan membaur di tengah masyarakat, dengan tugas seperti itu seringkali Babinsa memiliki inisiatif untuk mengumpulkan warga pada acara-acara tidak resmi guna mempererat hubungan masyarakat dan petugas. Kemudian dalam konteks tugas babinsa yang berada dalam satuan tugas di bawah naungan Kodim memiliki tugas khusus yaitu sebagai agent “kamsik” yang berarti keamanan berbisik, dimana tujuan dari digalakkan program tersebut adalah melihat rentannya Kecamatan Pajangan sebagai daerah yang baru terjadi konflik, sehingga dengan program tersebut Koramil dapat meminimalisir dan dapat meredam berbagai potensi konflik yang ada dengan memasuki ranah kehidupan masyarakat dari pintu ke pintu.

c. Polsek Kecamatan Pajangan

Kewajiban menjaga perdamaian dan keamanan di tengah masyarakat juga menjadi tanggung jawab dari Kapolsek, sebagai pihak berwajib yang menjadi institusi pengayom masyarakat, dan melaksanakan banyak program yang pada intinya untuk membuat masyarakat Kecamatan Pajangan jauh dari konflik yang akan muncul dikemudian hari. Program yang pertama guna menjaga perdamaian adalah memaksimalkan peran Babinsa kamtibmas, hampir sama dengan Babinsa yang harapan dapat meredam potensi-potensi konflik yang sekiranya dapat tumbuh di tengah masyarakat.

Dengan melihat perkembangan zaman yang terus berkembang, dan dinamis. Polisi juga melihat bagaimana peluang tersebut untuk terus memberikan sosialisasi perdamaian melalui media handphone dengan pesan singkat, dan hal tersebut dilakukan secara berkala, terutama pada Kecamatan Pajangan konflik yang terjadi pada tahun 2016 akhir, salah satu faktor kecil dan sepele dapat menjadi permasalahan besar yang melibatkan pihak-pihak luar (out group) adalah dengan begitu cepatnya menyebarnya informasi di tengah masyarakat melalui sms, ataupun media sosial lain yang sedang digemari oleh masyarakat. Dengan cara itu dapat meminimalisir konflik yang kemungkinan berpotensi hadir dikemudian hari. Kepentingan pihak luar dalam konflik di Pajangan sebenarnya belum terdeteksi begitu kuat, dalam beberapa penelitian mengatakan bahwa kepentingan mereka hanya sebatas membela masyarakat yang memiliki satu Agama dengan mereka, adanya keterpanggilan akan rasa persaudaraan, namun bila pertimbangannya sampai di tahap tersebut, dapat dikatakan bahwa rasa primordialisme yang tinggi merupakan kuncinya, ditambah bahwa pola konflik seperti itu sudah hampir pernah terjadi di Kecamatan Pajangan dengan mengajak pihak luar menjadi simpatisan mereka, dan menggunakan cara mobilisasi membawa isu-isu sensitif SARA yang rentan menyulut konflik.

Untuk tahap yang lebih jauh, kepolisian juga akan memaksimalkan peran pamong desa, terutama dalam membaca potensi konflik yang terkadang sulit untuk diterjemahkan oleh pihak kepolisian, karena karakter masyarakat masing-masing

daerah akan mudah dibaca oleh para pamong desanya sendiri. Pamong desa akan sering diberikan pelatihan, terkait manajemen konflik sosial, karena konflik besar yang sering terjadi hanya bersumber pada masalah-masalah kecil, karena tidak tanggapnya ataupun salah dalam manajemennya, maka konflik besar pun akan diminimalisir sebelum muncul ke permukaan. Kemudian polisi juga coba menghilangkan stigma buruk atau paradigma dari masing-masing suku satu dan yang lainnya, karena keutuhan Kecamatan Pajangan merupakan prioritas nomor satu.

Dapat dikatakan bahwa keplisian dan pihak TNI sudah berusaha terus menjaga dan membuat perdamaian terus tercipta di Kecamatan Pajangan khususnya, namun dalam konteks menjaga perdamaian dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan kedua institusi ini masih sebatas dalam tataran kapasitas mereka sebagai pengayom perdamaian masyarakat karena dilihat hanya ada beberapa program saja yang khusus dibuat untuk mencegah munculnya konflik, dan itu pun dapat dilihat belum signifikan hasil yang didapat, karena masih ada percik konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Adanya percik konflik disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan, padahal sudah pasti tanggung jawab dari Polsek dan TNI untuk keamanan daerah,. Tentu kedepannya dapat diharapkan bahwa kedua institusi ini dapat lebih proaktif dan mempunyai berbagai program yang cukup signifikan mengurangi bahkan menghilangkan konflik-konflik yang terjadi seperti Kecamatan Pajangan. Hal tersebut sejalan dengan pola pikir tentang konsep menjaga perdamaian oleh PBB dan juga dituangkan dalam buku *“The Blue Helmets : Review of UN Peacekeeping*, bahwa tanggung jawab menjaga perdamaian (peace keeping) ada ditangan militer *“an operation involving military personnel but without enforcement powers, undertaken by the United Nations to help maintain or restore international peace and security in areas of conflict. These operations are voluntary and are based on consent and cooperation. While they involve the use of military personnel, they achieve their objectives not by force of arms, thus contrasting them with the enforcement action of the United Nations”*. _Dapat diartikan bahwa menjaga perdamaian merupakan tanggung jawab militer tanpa kekuatan daya serang, yang dibawah oleh PBB untuk

membantu menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di wilayah-wilayah berkonflik.

Setelah pembahasan bagaimana peran yang dilakukan oleh pihak berwajib, dalam hal ini adalah institusi TNI dan POLSEK, lebih lanjut akan dibahas bagaimana peran dari pemerintah daerah, karena dalam perjalannya menjaga perdamaian pasca konflik tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah setempat, mulai dari peran Kabupaten Bantul, dalam tataran yang lebih tinggi juga bagaimana melihat peran pemerintah Kabupaten secara spesifik.

d. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Dalam konteks ini pemerintah daerah yang dimaksud adalah mulai dari pemerintah daerah tingkat paling tinggi yaitu kabupaten, hingga peran pihak desa yang merupakan hirarki terendah dari tata pemerintahan, Pemerintah daerah Kabupaten Bantul merupakan pihak yang paling bertanggung jawab di setiap konflik yang terjadi di Kecamatan Pajangan . Namun bila dicermati, belum ada peran maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, salah satu faktor yang terlihat adalah dalam konteks eskalasi konflik, kontrol sosial masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks sosial terciptanya kelas dan bagaimana segregasi antar etnis menjadi sebuah permasalahan yang menunjukkan lemahnya kontrol sosial desa, dan adat. Hal ini dibuktikan dengan adanya timbunan emosional antara kedua masyarakat yang terbentuk karena pola interaksi maupun tingkah laku etnis yang seringkali dianggap diluar kontrol oleh etnis lainnya. Padahal hal-hal seperti itu harus dapat dibawa sebelumnya apabila pemerintah sudah konsen dan melihat segala potensi konflik yang ada di tengah masyarakat, dan kapanpun bisa meledak, seperti yang terjadi akhir tahun 2016 di Kecamatan Pajangan .

Peran Pemerintah Bantul seharusnya dapat dimaksimalkan terutama dalam hal pencegahan konflik dalam hal ini pemerintah yang mengeluarkan kebijakan atas pelantikan camat Pajangan,. Namun yang seharusnya dapat melihat konflik dari berbagai sudut pandang terutama dalam melihat potensi-potensi dan memberikan rekomendasi konflik yang ada di Kecamatan Pajangan belum bekerja dengan

maksimal, Bakesbangpolinmas pada saat ini hanya sebatas sebagai badan pencatat kejadian konflik yang telah terjadi.

Peran besar dalam penyelesaian konflik antar Masyarakat dengan Pemerintah justru terlihat dari pemegang kekuasaan tertinggi di Kabupaten Bantul yaitu oleh Bupati Suharso yang berkoordinasi langsung dengan sekretaris Kabupaten Bantul, mereka tidak hanya menjadi saksi terkait penandatanganan nota perjanjian damai yang telah disepakati, peran yang lebih besar dapat dilihat adalah bagaimana bupati terus berusaha untuk menjadi juru damai dengan cara terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak yang dianggap mampu dan mumpuni untuk menyelesaikan konflik tersebut, terutama koordinasi dilakukan dengan cara memadukan peran masyarakat lokal yang memiliki rasa aman dan ketertiban kepada masyarakat umum.

Dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah kabupaten sejatinya tidak terlalu signifikan, karena sejatinya peran pemerintah daerah berperan hanya sebagai fasilitator ataupun badan yang hanya mendukung dari belakang apapun terkait terealisasinya perdamaian antara Masyarakat tersebut. Yang lebih berperan adalah pemerintah kecamatan Pajangan berkomunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bantul, dan tidak lupa untuk menjalin komunikasi terhadap masyarakat Pajangan yang menjadi aktor dalam konflik. Dengan harapan apabila komunikasi yang baik difasilitasi oleh pihak-pihak yang bersifat netral akan membuat semua orang tidak mencurigai keterpihakan pihak-pihak tertentu dalam hal penyelesaian konflik dan komunikasi yang lancar juga akan berpengaruh pada beberapa lama intensitas konflik akan berlangsung kedepannya, ketika komunikasi lancar terjadi, harapan dan permintaan dari semua pihak akan mudah terealisasikan.

Pasca ikrar perdamaian yang telah disepakati oleh Masyarakat dan Pemerintah, peran pihak kecamatan dalam hal menjaga perdamaian sebenarnya cukup normatif namun hasil yang dicapai cukup signifikan, karena Camat Pajangan mengatakan bahwa pihak kecamatan dalam menjaga perdamaian hanya berjalan sesuai dengan tupoksi mereka yaitu melakukan koordinasi dengan berbagai bidang

yang meliputi beberapa desa, karena kecamatan adalah perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang sifatnya melancarkan semua program yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, karena kepala kecamatan merupakan pejabat karir yang dipilih langsung oleh pemerintah kabupaten. Peran utama pihak kecamatan terlihat sangat aktif pada proses pendamaian masyarakat yang berkonflik. Tidak berhenti sampai disitu saja, pihak kecamatan juga terus memberikan andilnya dalam mempertahankan perdamaian yang telah dicapai. Pasca konflik yang telah berakhir pihak kecamatan terus melakukan sosialisasi terhadap ikrar perjanjian yang telah disepakati dengan hal tersebut diharapkan akan mencegah segala macam potensi konflik akan ketidakpuasan atas apa yang terjadi sebelumnya.

Proses sosialisasi yang dilakukan terkadang juga mendapat penolakan dari beberapa warga, karena banyak warga yang kurang puas akan point-point perjanjian yang telah disepakati. Untuk mensiasati hal tersebut pihak kecamatan terutama camat yang terjun langsung ke tengah masyarakat dengan sosialisasi point tersebut dibarengi dengan menanamkan jiwa wawasan kebangsaan terutama bagaimana mereka harus mengakui keberagaman yang ada disamping mereka merupakan suatu keniscayaan yang mereka pandang sebagai suatu hal yang justru dapat dimaksimalkan. Selain itu pihak kecamatan juga lebih menanamkan budaya sadar toleransi, dimana semua persoalan toleransi membuat masyarakat saling menghargai perbedaan, dengan hal tersebut, hal-hal yang terjadi sebagai penyulut konflik dapat dihilangkan.

Sosialisasi yang konsisten terhadap kasus konflik yang terjadi antar kedua desa masih terus digalakkan, tanpa lupa juga terus memangkas segala macam potensi konflik yang ada di Kecamatan Pajangan. Dapat koordinasi tersebut bupati Bantul menekankan bahwa perlu adanya peningkatan koordinasi dan pemantauan secara terpadu, dengan demikian konflik sosial yang akan berimbas pada gangguan keamanan daerah, dapat terdeteksi secara dini. Lebih jauh lagi aksi yang real dilakukan adalah dengan cara membentuk tim terpadu penanganan gangguan konflik sosial masyarakat, tim terpadu tersebut memiliki tugas pokok menyusun rencana aksi

terpadu penangan konflik sosial tingkat kecamatan. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala kecamatan, memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya, melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini, merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik, dan membantu penanganan mediasi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi dan rekonstruksi. Dengan adanya penancangan program yang jelas dari pemerintah kabupaten Bantul diharapkan dapat selalu menjaga keadaan damai di Kecamatan Pajangan.

Pada dasarnya *peace keeping* merupakan tahap lanjutan dari *peace making*, oleh karena itu harus ada keselarasan yang baik antar kedua program tersebut. Setelah ikrar perdamaian tercapai berbagai pihak di atas sudah berusaha mengimplementasikan ikrar perdamaian yang sudah diciptakan, seperti pihak berwajib menjalankan kapasitasnya sebagai pihak menjaga keamanan, karena salah satu konsep *peacekeeping* adalah proses penjagaan keamanan dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian dan berusaha untuk selalu menjaganya sebagai sebuah perisai dalam penyelesaian konflik yang terjadi selanjutnya. Penjagaan keamanan dengan berpedoman pada perjanjian yang telah disepakati terus dilakukan dan terus mendapatkan perhatian, menurut (Fisher:2001) menjaga perdamaian adalah kegiatan memantau dan menegakkan kesepakatan, menggunakan kekerasan bila perlu. Caranya mencakup pengawasan terhadap dihormatinya kesepakatan dan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang disepakati, dan dikatakan oleh fisher, dalam menjaga perdamaianpun dapat melakukan kekerasan.

Namun pada objek penelitian di Kecamatan Pajangan , dalam menjaga perdamaian masih menggunakan cara yang persuasif dan mengedepankan pendekatan yang musyawarah tanpa harus menggunakan kekerasan, karena pada dasarnya, kesepakatan domain yang telah terealisasikan sudah dapat menjaga masyarakat dalam perdamaian, walaupun memang masih banyak ketidak puasaan yang dirasakan oleh beberapa masyarakat. Namun pada dasarnya *peace keeping* yang berusaha

dioprasionalisasikan pasca konflik antar masyarakat dan pemerintah telah berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Dan tujuan akhir dari segala macam program menjaga perdamaian pasca konflik yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana masyarakat dapat menerima segala perbedaan yang ada dan selalu menghargai, terutama dalam hal perbedaan keyakinan. Tapi, dapat melihat dan menilai apa yang telah dilakukan oleh institusi pemerintah belum terlalu maksimal terutama apabila untuk menjaga perdamaian jangka panjang, karna dilihat disini bahwa semua program yang dijalankan hanya accidental saja dan tidak ada program yang mengarah pada tujuan jangka panjang, padahal bila dicermati dengan konflik yang terjadi di Kecamatan Pajangan harus direncanakan perdamaian dengan matang dan melihat dari semua aspek yang diperkirakan dapat menjadi potensi konflik kedepannya. Mungkin butuh pemetaan konflik yang lebih matang, ataupun justru pemetaan pembangunan kedepan yang lebih peka konflik sehingga tahap yang lebih jauh akan tercapai, seperti *peace building* karena membangun perdamaian kedepannya akan tercipta damai yang sejati.

D. Peace Building (Proses Jangka Panjang)

Membangun perdamaian merupakan suatu upaya sistematis dan berkesinambungan dalam rangka memperkuat ikatan atau hubungan antar pemangku kepentingan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Upaya ini didasarkan landasan filosofis, yuridis, psikologis dan sosiologis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara kesehatan. Oleh karena itu, tantangan dalam pengelolaan pembangunan dan pemerintahan hendaknya didasarkan pemahaman tentang konteks dan kebutuhan masyarakat tentang tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Maka dari itu, dalam bab ini dipaparkan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan ataupun masih dalam program jangka panjang yang direncanakan oleh pemerintah ataupun semua pihak yang berintegrasi menginginkan perdamaian yang abadi kedepannya. Perdamaian yang abadi diwujudkan dengan banyak cara dan

siasat, seperti adanya kebijakan-kebijakan yang semakin menguatkan berbagai macam upaya yang dilakukan ataupun justru membuat peraturan yang mengatur segala macam yang dapat membuat Kecamatan Pajangan damai dan selalu dalam keadaan yang harmonis. Dengan tujuan besar kedepannya, tentu diperlukan berbagai kiat-kiat untuk menyelesaikan hal ini, oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang matang ataupun skenario yang tersusun dengan rapi dan baik, terutama harus ada keselarasan antara perencanaan dan implementasi kebijakan. Selain upaya-upaya yang tengah dijalankan oleh berbagai pihak.

Skenario ataupun perencanaan kedepan merupakan sebuah awal dari semua program panjang, terutama terkait bagaimana membuat perencanaan yang peka konflik dengan tidak melupakan daerah-daerah terkait yang memiliki riwayat konflik yang panjang, karena dalam lokasi yang memiliki sejarah panjang terkait konflik harus dibuat rancangan tersendiri agar perdamaian dapat terus berjalan. Karena kehidupan begitu dinamis skenario juga harus memperhatikan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat, karena skenario yang baik juga harus mempertimbangkan skenario terburuk yang kemungkinan akan terjadi kedepannya. Berdasarkan strategi yang di aplikasikan di Kecamatan Pajangan, berdasarkan yang berkonflik dalam menjaga perdamaian adalah dengan cara menanamkan wawasan kebangsaan dengan cara mensosialisasikan wawasan kebangsaan, terutama bagaimana menghormati perbedaan yang ada dan tidak akan pernah membedakan agama, suku mereka. Karena integrasi dalam interaksi sosial akan lebih penting. Kemudian untuk terus menjaga perdamaian adalah dengan cara membangkitkan nilai budaya lokal setempat dan dari pihak berwajib akan menanamkan budaya sadar toleransi dan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat yang sedang berjalan, karena selama ini konflik yang timbul di tengah masyarakat lebih banyak disulut dengan kriminalitas.

1. Membangun Skenario Perdamaian Kedepan

Perumusan strategi guna mempertahankan perdamaian dan mendorong perdamaian yang abadi dan akan lebih baik untuk mencegah konflik baru di Kecamatan Pajangan pada khususnya. Pada dasarnya berbagai tahap perencanaan harus melewati berbagai tahap, mulai dari identifikasi, menyusun skenario dan melihat dari sisi terburuk apapun perencanaan kedepan yang paling matang. Skenario yang dibuat diharapkan dapat merespon segala kekurangan yang sebelumnya menjadi celah pecahnya konflik, kemudian adalah untuk mentransformasikan konflik yang terlanjur muncul dengan harapan energi negatif yang muncul akibat konflik dapat diubah kearah positif.

Perencanaan atau skenario kebijakan yang dibuat bertujuan untuk membuat suasana aman yang berkelanjutan, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan dinamis manusia tidak dapat diprediksi, namun diharapkan skenario yang telah dibuat dengan maksimal akan meminimalisir konflik kedepannya yang mungkin akan muncul. Dari skenario yang telah dibuat diharapkan akan terjadi banyak perubahan, terutama bagaimana skenario yang dibuat untuk dapat mengidentifikasi kecenderungan konflik di Kecamatan Pajangan, dari konflik tersebut hal positif yang bisa diambil adalah masyarakat kembali menjunjung nilai lokal yang selama ini sudah cukup lama ditinggalkan. Dengan hal tersebut besar harapan bahwa perdamaian akan tetap terwujud dan konflik akan bisa diredam sebelum muncul dipermukaan.

Sejak konflik muncul dan diakhiri dengan adanya perjanjian damai yang disepakati oleh masyarakat. Terciptanya rasa aman dan berkurangnya aksi masyarakat, kemungkinan merupakan imbas dari terciptanya perdamaian pihak-pihak yang berkonflik, hal tersebut merupakan suatu kegembiraan, bahwa konflik dapat merubah keadaan secara signifikan. Terciptanya keamanan yang kondusif di tengah masyarakat merupakan salah satu skenario terbaik dari proses terciptanya perdamaian abadi yang diimpikan masyarakat hingga masa yang akan datang.

Kepatuhan akan resolusi konflik yang tertuang dalam ikrar perdamaian belum benar-benar teruji, karena belum ada peristiwa yang menguji kadar kesabaran dari masyarakat Pajangan. Namun dari beberapa keterangan warga sudah muncul adanya, kepercayaan terhadap pihak yang berwajib mulai tumbuh di tengah masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa adanya kepercayaan terhadap lembaga yang berwajib memberikan kabar bahagia, walaupun dalam presentase yang masih sedikit, karena kedepannya diharapkan apabila ada kasus Intoleran atau apapun yang berkaitan dengan perbedaan karena kesaadaran toleransi dan hal tersebut merupakan kapasitas dari pihak tokoh adat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait intoleran. Jadi semua peristiwa melanggar dapat diserahkan kepada pihak yang berwajib agar tidak ada aksi masyarakat yang terjadi terutama di Kecamatan Pajangan.

Janji akan terbukanya masyarakat dalam hal patuh terhadap perdamaian yang berlaku, membawa angin segar bagi masyarakat Pajangan. Hal penting selanjutnya adalah bagaimana ketika masyarakat tidak memperlmasalahkan ketika berada dalam keadaan daerah yang multikultural, hal tersebut merupakan suatu keberuntungan yang harus disyukuri, masyarakat yang mayoritas dengan suku tertentu dapat mempelajari desa lain yang merupakan suku mayoritas tertentu pula, dengan hal tersebut kita dapat lebih peka dan dapat lebih mengerti keadaan berbagai suku yang ada di sekeliling kita, dengan semakin mengertinya akan perbedaan yang merupakan suatu anugerah akan berdampak pada proses interaksi yang akan membangun solidaritas antar agama yang dapat mengantarkan ke gerbang perdamaian yang abadi. Selain faktor hubungan antar warga sipil yang harus disoroti, tidak boleh dilupakan bahwa peran pemerintahan juga harus tetap kita hadirkan dalam proses kehidupan, karena pemerintahan merupakan penyambung kepentingan antara masyarakat dan negara, karena hal tersebut harus adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat,

Berbagai hal kemajuan yang dimulai pasca konflik harus disyukuri dengan benar-benar, namun masih saja ada berbagai faktor yang diperkirakan dapat memunculkan konflik di kemudian hari. Terlepas dari itu kecamatan Pajangan

merupakan salah satu daerah yang pernah konflik dengan pemerintah, terlepas dari itu bahwa masyarakat Pajangan juga yang merupakan sangkar dari para pengrajin batik. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat rasa kebahagiaan dan Istimewa dimata pemerintahan Bantul.

Perihal ekonomi yang merupakan akar pembangunan masyarakat di Kecamatan Pajangan, belum terlalu terbaca pemerintah daerah ataupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa konflik, mereka menganggap konflik yang terjadi hanya sebatas adanya intoleran dan penolakan camat, analisa terhadap konflik yang dilakukan belum sampai pada pemetaan pada tahap yang lebih komprehensif, karena ketika masih berbicara intoleran, hal tersebut hanya sebagai pemicu saja, maka konflik yang terjadi akan sulit terselesaikan karena pemetaan yang dilakukan tidak komprehensif. Jadi apapun skenario kebijakan guna menghentikan konflik akan sulit untuk diwujudkan.

Untuk menyikapi berbagai macam hal tentang dampak terburuk dari tidak berhasilnya berbagai program yang dijalankan, terutama pasca konflik terjadi. Terutama bagaimana pemerintah daerah membuka akses lebar bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan tetap, kemudian adalah bagaimana pemerintah dapat mengatasi berbagai macam intoleran yang terjadi. Diharapkan dengan adanya keseimbangan dan pemetaan terhadap akses perekonomian akan berdampak hilangnya berbagai aksi dan aspek konflik kedepannya, karena apabila semua aspek berjalan dengan baik dan didistribusikan kepada seluruh masyarakat hal tersebut akan meminimalisir segala macam benih konflik yang sering tuumbuh di tengah masyarakat, rasa aman dan tenteram yang ditimbulkan oleh tidak adanya intoleran dan keadaan ekonomi masyarakat yang membaik akan berdampak pada tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

Ketika kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ataupun kepolisian meningkat akan berdampak positif terhadap penerimaan masyarakat terhadap semua program yang dibuat pemerintah guna membangun perdamaian pasca konflik. Salah satu faktor penyebab konflik adalah kurang mampunya pemerintah menata segala

macam perbedaan di tengah masyarakat, terutama tentang perbedaan agama dan ras, karena selama ini sangat jelas ada perbedaan yang mencolok dan terpisahkan antara agama satu dan lainnya, selain itu pemicu konflik adalah adanya aksi intoleran yang dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut mencerminkan bahwa ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang selama ini tidak berpihakan, sehingga masyarakat menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri.

Bila pemerintah daerah sudah memahami berbagai persoalan terutama bagaimana bisa melihat dan peka terhadap kultur masyarakat di Pajangan yang multikultur, bukan tidak mungkin perdamaian abadi akan tercipta dan tentunya ditambah dengan percepatan pembangunan di berbagai bidang akan mempermudah konsolidasi perdamaian yang sedang berjalan ataupun masih dalam tahap perencanaan ke depan.

2. Penelusuran dan Penyelesaian Akar Konflik Vertical

Konflik yang bersifat vertical merupakan suatu hal yang mencegah pembangunan daerah. salah satunya akibat dari penyelesaian konflik belum pada tataran melihat suatu konflik dari suatu masalah saja, padahal pada konflik tertentu yang bersifat terulang pasti ada penyelesaian yang kurang tepat, pada dasarnya konflik vertical dapat dianalogikan sebagai fenomena gunung es yang seakan kecil dipermukaan namun cukup memendam hal yang besar dan cukup membahayakan. Untuk itulah akar konflik harus benar-benar dicari dan tentu harus tahu bagaimana solusi tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Intensitas konflik yang terjadi di Kecamatan Pajangan, yang dikemudian hari akan kembali pada titik sebelumnya. Agar siklus dapat diputus perlu adanya penyelidikan secara mendalam tentang akar konflik yang terjadi. Pada dasarnya konflik di Pajangan memiliki penyebab yaitu kebijakan pemerintah. Kesenjangan ekonomi merupakan suatu hal yang banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia, tapi tidak seluruhnya kesenjangan ekonomi dapat memicu suatu konflik sosial, tidak

menutup kemungkinan jika kesenjangan ekonomi yang berbeda di masyarakat Pajangan yang secara etnis berbeda juga makin memperburuk keadaan yang ada,

Selain faktor ekonomi yang menjadi akar masalah disana, Intoleran yang merupakan salah satu faktor yang menunjang munculnya konflik sosial belakangan ini. Angka intoleran yang tinggi dan tidak ada penindakan yang serius dari para pihak berwajib membuat seakan Kecamatan Pajangan merupakan daerah yang tidak memiliki suatu pemerintahan ataupun pihak berwajib yang dapat diharapkan untuk menjaga kehidupan masyarakat dalam keadaan multikultur.

Prinsip-prinsip yang melandasi upaya penguatan perdamaian tidak berdiri sendiri atau terlepas dari kerangka kerja pembangunan berkelanjutan. Proses perdamaian sebagai bentuk transformasi nilai-nilai, komitmen, dan harapan bersama untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan . Prinsip-prinsip perdamaian hendaknya menjadi dasar dalam praktek pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat. Dengan demikian proses perdamaian sebagai upaya membangun masyarakat dalam mencapai kesejahteraan keadilan secara berkelanjutan. Demikian halnya dalam mengembangkan program dan kerangka kerja pembangunan daerah harus didasarkan atas prinsip-prinsip pengalaman dan praktek yang telah terbangun dalam masyarakat yang diformulasikan dalam bentuk komitmen, moralitas dan semangat kebersamaan. Prinsip-prinsip perdamaian (universal) menjadi pijakan penting yang akan memandu seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan yang dicita-citakan. Siapapun harus mampu menjaga komitmen dan integritas untuk menjaga perdamaian agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan dampak secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip perdamaian juga sebagai landasan kultural yang diyakini oleh semua pihak untuk diperjuangkan dan diinternalisasikan dalam praktek pembangunan.

Proses konsolidasi perdamaian yang terus dilakukan demi mewujudkan perdamaian yang abadi, karena apabila dilihat dengan kasat mata, apa yang terjadi saat ini terutama interaksi yang melibatkan masyarakat dan pemerintah sudah

berjalan harmonis dan konflik sudah tidak terlihat, namun disisi lain harus dilihat lebih dalam apakah perdamaian yang telah dilakukan sudah benar-benar dapat diterima oleh semua pihak. Selain interaksi anantara masyarakat yang semakin membaik antara agama yang berbeda yang berada dalam kecamatan yang bersebelahan dapat dilihat berbagai kemajuan pasca konflik yang dapat dilihat, solidaritas antar agama yang berseteru terlihat semakin kuat, kemudian adanya penguatan identitas oleh kelompo-kelompok yang terlibat konflik, hal tersebut merupakan indikasi baik dilihat dari keragaman suku budaya dan agama.

Konsolidasi perdamaian yang sedang berjalan ataupun sedang dalam proses jangka panjang membutuhkan kepedulian semua pihak untk menjalankan semua program yang mungkin telah direncanakanataupun program-program yang merupakan hasil modifikasi dalam proses menuju perdamaian yang abadi, hal yang dapat dilihat saat ini keadaan yang sudah berangsur membaik tetap membutuhkan pembangunan di segala sektor untuk mewujudkan keseimbangan dan pemerataan pembangunan di segala bidang.

Melihat bagaimana kuantitas konflik yang terjadi di kecamatan Pajangan, maka dari itu, memerlukan suatu konsep pembangunan yang peka konflik, karena apabila suatu pembangunan yang dilakukan hanya memikirkan aspek yang dituju saja dan tanpa memikirkan aspek sampingan lainnya, hal tersebut akan berpengaruh dalam menentukan hasil akhir dari suatu pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Dalam dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam World Summit tahun 2005 menyatakan pembangunan berkelanjutan terdiri atas tiga pilar, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan, sama halnya dengan konsep pembangunan pasca konflik yang seharusnya dilakukan oleh Kabupaten Bantul.

Ketiga aspek tersebut harus benar-benar diperhatikan apabila mengharapkan suatu perdamaian yang abadi, Akan ditelaah satu persatu aspek yang dapat dilihat dalam konteks keadaan di Pajangan. Pada dasarnya, hasil dari suatu program peace buliding akan terlihat dalam waktu jangka panjang, karena menurut Galtung dalam

Polloma (1994), pembangunan perdamaian lebih menekankan kepada proses jangka panjang, penelusuran dan penyelesaian akar konflik, mengubah asumsi-asumsi kontradiktif, serta memperkuat elemen yang dapat menghubungkan pihak-pihak yang bertikai dalam formasi baru damai mencapai perdamaian positif. Walaupun begitu kita sebagai masyarakat tidak harus mencari suatu hal yang praktis, hanya melihat segala macam persoalan pada akhir-akhir saja, karena pada dasarnya proses yang terjadi akan berdampak pada hasil akhir yang akan tercapai. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan mulai dari awal hingga akhir.

Tujuan dari dibuatnya rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah terutama dalam bidang ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat dan distribusi pendapatan yang merata serta kesempatan kerja, sehingga mengurangi penduduk miskin. Caranya dengan memberikan akses yang adil kepada masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial sarana dan prasarana, tanpa diskriminasi. Dengan sudah adanya rancangan pembangunan jangka panjang kemudian dalah bagaimana mengimplementasikan segala macam rencana yang sudah ada karena kebijakan yang tertuang dalam peraturan sebaik apapun, apabila tidak diimplementasikan dengan baik akan percuma segala macam peraturan yang telah dibuat.

Segala macam rencana jangka panjang kedepan guna membangkitkan ekonomi masyarakat Pajangan sudah terencana dengan baik, tinggal selanjutnya adalah bagaimana mengaplikasikan segala macam skenario yang telah dibuat. Skenario yang dibuat oleh pemerintah Bantul dinilai sudah cukup baik, terutama selain memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat dengan berbagai cara meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat, pemerintah juga tidak lupa untuk meningkatkan daya saing masyarakat secara global, dengan cara tetap mendukung majunya pendidikan di Pajangan, dengan tujuan akhir akan memperkuat masyarakat secara akademis sehingga apapun yang terjadi kedepannya, masyarakat memiliki daya juang dan modal secara akademis, dan tentu ketika derajat pendidikan masyarakat tinggi dan terdistribusi secara merata ke semua masyarakat, tidak akan

ada lagi menyebabkan konflik sosial di tengah masyarakat. Pendidikan merupakan tabungan masa depan dari sebuah peradaban manusia, dengan tingginya derajat pendidikan masyarakat diharapkan semua masyarakat dapat mengatur semua pikiran ataupun pengaruh yang dapat dimasukkan ke dalam masyarakat, berikut merupakan beberapa program real yang dibuat oleh pemerintah dari sektor pendidikan. Dimulai dari penentuan kawasan pembangunan sarana pendidikan, Peningkatan kuantitas sarana pendidikan, rehabilitasi dan direkonstruksi, Peningkatan kualitas tenaga pengajar dengan pelatihan.

Dengan berbagai macam program konkrit terkait lebih menyediakan sarana pendidikan lebih baik, baik dari sisi pendidikannya ataupun sarana dan prasarana penunjang belajar mengajar para siswa sehingga output dari program belajar mengajar, benar-benar membentuk generasi penerus yang berkualitas, tentu bukan hanya dari segi nilai akademiknya saja, melainkan dari sisi mental, spiritual dan etika akan terbentuk dengan baik, sehingga terpaan nilai-nilai negatif dapat mereka tangkal dengan kapasitas pendidikan yang mereka miliki.

Penyebab konflik sosial yang terjadi antar masyarakat dan pemerintah dikarenakan oleh adanya penolakan camat, dan hal tersebut dapat dipastikan permukaan konflik yang terjadi, ataupun bisa dikatakan hal tersebut hanya sebagai pemicu di tengah konflik sosial yang terjadi. Walaupun aksi penolakan dipandang hanya sebagai pemicu konflik, namun hal tersebut juga harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya para pihak berwajib ataupun pihak pemerintahan daerah, karena penolakan camat Pajangan sudah menjadi tanggung jawab semua stakeholder. Perhatian khusus yang diberikan pihak pemerintah daerah guna menyelesaikan permasalahan tentang intoleran yang sudah terlihat, dari adanya program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang toleran.

Selain program jelas tentang toleransi yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah, ada kesadaran dari pihak lain untuk membantu pemerintah daerah

dalam mengatasi hal tersebut. Dalam hal ini Komnas HAM juga memiliki pandangan yang sama terkait akar masalah yang ada di Pajangan.

lemahnya budaya sadar toleransi. Oleh karena itu komnas HAM memberikan rekomendasi adanya gerakan pendidikan saling menghargai perbedaan agar masyarakat tetap menjaga perdamaian, kemudia adanya pemaksimalan pendidikan tentang keBinekaan. Denga hal tersebut diharapkan konflik akan sepenuhnya selesai dan pembangunan dapat berlanjut.(Mengutip Wawancara Komnas HAM)

Dengan visi jelas masyarakat bisa memahami perbedaan, bukan hanya menjadikan intoleran sebagai akar konflik dengan pemerintah, namun disini diharapkan toleransi justru dapat membimbing kehidupan masyarakat agar lebih teratur dan dapat berjalan sesuai kaidah kehidupan masyarakat secara umum, karena apabila budaya toleransi sudah tertanam dengan baik dan merasuk dalam jiwa masyarakat, keadaan aman dan tenteram tanpa adanya kerusuhan, intoleran ataupun berbagai gangguan kehidupan dalam masyarakat akan sangat mungkin terwujud dan hal tersebut bukan hanya sebatas menjadi visi dan misi suatu daerah.

Segala macam visi dan misi jangka panjang yang telah direncanakan guna proses pembangunan yang lebih komprehensif dan dapat bertahan dalam jangka panjang sudah terekam dalam blue print yang cukup baik, dengan sudah memperhatikan banyak aspek mulai dari sektor ekonomi, pendidikan hingga keamanan. Dari segi perencanaan ke depan sudah sangat baik dan matang, tergantung bagaimana kedepannya para phak-pihak yang bertanggung jawab untk melaksanakannya, namun hasil baik dari semua program yang telah direncanakan tidak hanya tertumpu pada pihak-pihak birokrat, namun disini harus adanya kerjasama juga dengan melibatkan masyarakat yang tentu menjadi objek sasaran tujuan dari sebuah program pemerintah. Maka dari tu, semua pihak harus dilibatkan mulai dari pembuatan program hingga pada tahap evaluasi, sehingga pada proses implementasi juga tidak ada perlawanan ataupun resistensi dari masyarakat.

Program jangka panjang yang telah dirumuskan Kabupaten Bantul , sudah tertata dengan baik, dan sudah tertuju kepada semua aspek kehidupan masyarakat,

karena menurut Fisher (2001:126-138) bagaimana rekonstruksi harus difokuskan pada sisi fisik, sosial dan psikologis dimana secara fisik kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi harus dipulihkan terlebih dahulu, kemudian harus adanya rekonstruksi dari dalam diri manusia itu sendiri lewat psikologis para masyarakat yang konflik, kemudian pada tahap selanjutnya adalah bagaimana mengembalikan realisasi baik yang terjalin sebelum konflik mencuat ke permukaan, Rekonstruksi yang dilakukan sudah dijelaskan secara rinci, walaupun segala usaha dilakukan dan coba ditrapkan dalam keadaan masyarakat, namun perlu diakui bahwa semua hal tersebut belum benar-benar sesuai dengan kesempurnaan perdamaian. Karena memang pada hakikatnya tidak ada sekelompok masyarakat yang tidak ditimpa oleh suatu konflik, baik konflik berskala besar ataupun kecil.

Penilaian berhasil atau tidaknya pembangunan perdamaian pasca konflik harus melewati proses panjang dan tidak mudah, karena suatu perlu penilaian yang objektif membutuhkan rentang waktu yang cukup lama dan berjenjang. Dan berbicara tentang beberapa lama *peace building* harus dilakukan merupakan persoalan yang tak kalah rumit. Praktek internasional yang banyak memberi waktu memberi waktu sekitar 2-3 tahun dianggap tidak cukup untuk membuahakan perubahan sosial politik yang kondusif untk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Roland Paris menyarankan dua kali siklus pemilihan umum (1997) dalam Kusnanto Anggoro. Atau antara 8-10 tahu. SIPRI (*Stockholm Internatinal Peace Reserach Institue*). Menegaskan bahwa tujuan *peace building* adalah untuk mencegah terjadinya konflik, maka dalam beberpa upaya itu harus melibatkan program bina bangsa yang kerap kali menyita waktu SIPRI (1998). Oleh karena itu, dalam keadaan pasca konflik yang berjalan satu tahun ini belum dapat dinilai segala program jangka panjang dikatakan berhasil atau tidak. Namun harus menlai sudah ada langkah nyata baik yang telah dilakukan saat ini untuk pembangunan ke depan.

Akhir dari segala macam program jangka panjang adalah membuat masyarakat sejahtera, aman dan tenteram. Namun perlu dicermati adalah bagaimana program yang dibuat apakah dinilai merupakan sebuah program yang membumi,

maksudnya adalah bagaimana program jangka panjang yang dibuat akan lebih mudah diimplementasikan, dan bukan hanya program yang terkesan heboh, namun tidak rasional untuk diterapkan ataupun ada sebuah program yang hanya bersifat normatif dan dirasa tidak akan membuat perubahan yang signifikan terhadap daerah tersebut, maka dari itu konsep perencanaan selain harus bersifat membumi dengan mempertimbangkan aspek pendukung dan penghambat yang kemungkinan terjadi dikemudian hari, pembangunan berkelanjutan yang termaktub dalam visi misi jangka panjang perlu diterjemahkan dalam keadaan yang lebih real dan wajib untuk memperhatikan program jangka pendek dan menengah yang sedang dijalankan, sehingga program yang dibuat akan berkesinambungan dan tentu akan lebih mudah dalam proses implementasinya,

Adapun penelusuran terkait akar masalah yang ada di kecamatan Pajangan, memang tidak jauh dari ketiga sektor yang dipaparkan diatas, terkait persoalan agama memang sudah tidak terlalu signifikan dampaknya saat ini, pemerintah maupun masyarakat sudah lupa dan mencoba menghilangkan efek-efek masa lalu yang kemungkinan tercipta dari peristiwa tersebut. Namun pemerintah juga tidak semerta-merta menghilangkan penguatan agama dalam proses sehari-hari. Penguatan agama terus dipertahankan dan ditanamkan di setiap masyarakat Pajangan, terutama fokus terhadap treatment yang dilakukan di bangku sekolah, terutama untuk mengatasi faham-faham radikal dan menyimpang.

3. Merubah Asumsi Kotradiktif di Masyarakat

Perubahan yang diharapkan tidak hanya sebatas bagaimana pemerintah dapat memenuhi aspek dasar dari masyarakat, yang lebih jauh adalah bagaimana membangun masyarakat dari aspek diri mereka pribadi, yang dimaksud disini adalah pentingnya masyarakat memahami dan memaknai setiap kejadian di tengah mereka dengan pola pikir yang positif, ketika proses pembangunan pola pikir masyarakat dapat dikonstruksi dengan baik dan terarah pada asumsi-asumsi positif merupakan

suatu hasil dari apa yang dibangun dari diri masyarakat terutama terkait pola pikir dan pandangan mereka melihat orang-orang berbeda di sekitar mereka.

Cara pandang yang buruk terhadap agama masih terjadi diberbagai belahan daerah di Indonesia, terutama daerah luar pulau Jawa. Banyak segregasi sosial yang disebabkan oleh cara pandang kelompok satu dan yang lainnya, hal tersebut merupakan persoalan pelik yang harus diatasi. Ketika Indonesia membanggakan keanekaragaman yang dimilikinya justru disitu pula tersimpan bara konflik yang setiap waktu dapat tersulut dan berkobar menjadi api yang cukup besar, oleh karena itu penting kiranya untuk memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan pola pikir masyarakat yang masih kotradisi dengan falsafah bangsa Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”.

Tujuan akhir dari menyelesaikan pola pikir masyarakat terhadap perbedaan yang ada di tengah mereka, mencari titik temu dari setiap perbedaan yang ada di tengah masyarakat, dan tentu hal itu akan bermuara pada prinsip perdamaian yang akan tetap dipegang oleh masyarakat seterusnya, cara pandang antara satu dengan lainnya memang harus dirubah secara ekstrem karena memang sangat terlihat bagaimana gap yang tumbuh di tengah masyarakat sangat kental, baik dari segi ekonomi, sosial budaya. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran diri setiap masyarakat itu sendiri. Kemudian yang sedang menjadi sorotan masyarakat luas adalah terkait intensitas konflik yang tinggi diakibatkan oleh tingginya aksi intoleran,

Dari hal tersebut terlihat ada masalah yang dihadapi di Pajangan, yang pertama bagaimana membuat masyarakat lebih menghormati perbedaan agama yang ada di masyarakat Pajangan, hal tersebut sudah menjadi program jangka panjang yang sedang dibangun oleh pemerintah, terpenting adalah bagaimana semua pihak terkait dapat memberikan masukan dan menyadarkan bahwa apa yang mereka tuntut merupakan kesalahan, apalagi bila melihat yang mereka bela dan perjuangkan merupakan dari pihak yang bersalah. Mereka membela atas nama solidaritas agama yang salah dan hal tersebut harus dirubah dari pola pikir masyarakat, asumsi yang salah ditengah masyarakat coba dikikis dengan banyak cara, salah satunya yang

dilakukan adalah lebih cepat merespon setiap kali ada intoleran yang terjadi di tengah masyarakat, sebisa mungkin akan dicoba untuk pencegahan, karena pada dasarnya pihak yang berwajib mengakui bahwa tidak akan bisa memprediksi dimana intoleran akan terjadi, melainkan hanya sebatas bagaimana mencegah aksi lanjutan dari intoleran tersebut. Perubahan pola pikir masyarakat yang masih kontradiktif terutama dalam menghadapi konflik mulai harus ditekankan saat ini. Hal tersebut mengacu pada Idiologi Negara menghormati perbedaan, perubahan paradigma penanganan konflik merupakan salah satu substansi penting dan urgen dari pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial. Terdapat perubahan paradigma penanganan konflik yang ditekankan dalam peraturan dimana terdapat perubahan, khususnya ditekankan dan berperan aktif. Bila dahulu peran negara sangat terlihat dominan (Government Drivers), pada saat ini masyarakat harus lebih berperan aktif dalam proses penghentian konflik.

Asumsi kontraktif di masyarakat terus bergulir begitu saja, terutama terlihat apa yang terjadi saat ini, bagaimana agama satu melihat agama lainnya. Karena konflik yang sering muncul saat ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma antara agama dengan agama lainnya. Intoleransi yang berujung konflik antar perbedaan agama terus bergulir di tengah masyarakat. Karena konflik akhir-akhir ini sering muncul dipermukaan merupakan konflik vertical, sehingga fokus untuk merubah kontradiktif di masyarakat di fokuskan pada hal tersebut, jarang adanya konflik vertical yang menjadi konflik terbuka.

4. Memperkuat Faktor Damai

Ketika damai telah dijaga selama beberapa waktu ini, banyak indikasi yang telah memperlihatkan banyak kemajuan terkait perdamaian, yang ingin dibangun dalam jangka panjang. Semua yang telah dicapai harus dipertahankan dan lebih jauh harus diperkuat, banyak cara yang bisa ditempuh oleh para pemangku kekuasaan untuk memperkuat hal-hal yang dirasa mampu membuat perdamaian dapat bertahan lama. Membangun suatu lembaga baru yang konsen dalam menangani berbagai

masalah konflik, salah satunya cara yang paling tepat untuk menekan berbagai faktor konflik, dan hal tersebut sudah diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dengan sangat responsif membangun lembaga yang mengurus berbagai masalah terkait konflik.

Tidak dapat dengan mudah mewujudkan suatu perdamaian jangka panjang, banyak tahap dan perlu banyak uluran tangan dari semua pihak yang bertanggung jawab dalam proses perwujudan perdamaian, dalam hal ini otoritas dalam mengambil kebijakan,

Dalam proses membangun perdamaian banyak syarat yang harus dilakukan adanya semua dapat berjalan sesuai sistem, karena pada dasarnya membangun perdamaian tidak hanya berorientasi pada satu aspek saja melainkan harus semua aspek secara komprehensif harus diambil, menurut (Brahim:2000) pembangunan perdamaian dimaknai untuk

“membangun kembali landasan perdamaian dan menyediakan berbagai perangkat untuk membangun sesuatu yang lebih dari sekedar peran dan dapat bekerja secara keseluruhan dan komprehensif.

Salah satu aspek yang dibangun oleh penyediaan perangkat aplikatif oleh pemerintah daerah kabupaten Bantul adalah membentuk suatu perangkat, dalam hal ini ditransformasikan dalam sebuah lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Dua lembaga yang dikukuhkan pada tanggal 27 April 2017 bertujuan untuk membangun dan memelihara kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia, khususnya di daerah kabupaten Bantul. Karena pemerintah mulai menyadari begitu rentannya masyarakat Bantul terdampak berbagai macam persoalan seperti ini. Pembentukan dua lembaga tersebut merupakan langkah responsif dari kejadian konflik yang terjadi antara di Kecamatan Pajangan.

Tupoksi dan tugas dari kedua lembaga tersebut sudah jelas diatur dalam beberapa pasal dalam peraturan daerah sebagai berikut Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan, menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, menghormati dan percaya diantara umat beragama. Kemudian Tugas pokok Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) mempunyai tugas menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi camat mengenai kewaspadaan dini di masyarakat.. Tugas yang sudah jelas dan telah dirumuskan harus dimaksimalkan dalam hal pencegahan tentunya, karena apabila suatu lembaga hanya bersifat pasif dan bergerak ketika sudah ada yang terjadi hal tersebut merupakan salah satu kegagalan lembaga yang dibuat bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Membentuk suatu lembaga baru yang bertujuan untuk menanggulangi konflik yang kemungkinan besar hadir di kemudian hari merupakan salah satu wacana dan rencana dari sebuah pembangunan perdamaian jangka panjang, ketika lembaga baru dibentuk dan fokus terhadap suatu masalah tertentu.

Dengan dibentuknya lembaga khusus yang memiliki fungsi dalam hal pencegahan terhadap konflik dimasa depan, Dalam hal ini dibentuk komunitas sebagai *community policing* (Susan, 2012:98) komunitas dibentuk untuk ikut aktif menjaga keamanan sosial, melalui model *community policing* pihak berwajib akan dibantu oleh masyarakat untuk mengidentifikasi “provokator” atau individu yang cenderung berpotensi memobilisasi kekerasan kolektif, konsep tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan terhadap dua lembaga baru yang dibentuk oleh Pemerintah Bantul dalam hal menjaga kestabilan sosial di tengah masyarakat.

Selain membentuk itu pemerintah Bantul juga terus berusaha memaksimalkan dan memperkuat peran lembaga-lembaga yang sudah ada dengan berbagai program yang diberikan tanggung jawab kepada mereka , banyak cara dilakukan untuk

memaksimalkan berbagai macam hal dalam proses penanggulangan konflik sosial, seriring semakin sadarnya pemerintah akan pentingnya pencegahan konflik sosial. Pemerintah Kabupaten Bantul sedang gencar menggalakan berbagai macam rapat koordinasi yang diikuti oleh berbagai macam stakeholders, mulai jajaran eksekutif, legislatif dan lembaga pengamanan terutama tujuan dari diadakannya rapat koordinasi ini guna menyambut adanya hajatan besar dalam pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Bantul

Dalam rapat koordinasi yang dilakukan juga disepakati adanya pembentukan tim penanggulangan konflik sosial, mereka memiliki tugas antara lain menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat kabupaten, Mengkoordinasikan, mengerahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala kecamatan, Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanggulangannya, Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini, Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik dan Membantu pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada tahap ini negara masih menjadi aktor dominan dalam hal peduli membangun institusi yang konsen terhadap perdamaian, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah menandakan bahwa masih kurang pedulinya masyarakat sipil ataupun pihak-pihak luar yang melihat konflik di Pajangan bukan suatu keadaan urgent, berbeda dengan daerah-daerah yang menjadi “langganan” konflik, dalam istilah (Triyono:2007) sebagai *the hotspot area*, seperti apa yang terjadi di Aceh, Maluku, Papua. Sudah banyak lembaga-lembaga baru lahir dan tumbuh seperti Koalisi HAM Aceh, Baileo Maluku, ALDP-Papua hal tersebut mengindikasikan bahwa ada semangat perubahan yang mereka canangkan ada rasa ingin menyelesaikan konflik yang bersifat laten dan bukan hanya sekedar menyelesaikan suatu konflik, melainkan dalam tahap lebih jauh para NGO dan lembaga masyarakat yang independen ini ingin membangun dan mentransformasikan dari sebuah konflik menjadi hal yang lebih positif. Dan hal tersebut merupakan suatu harapan yang harus segera direalisasikan

terlebih diberberapa daerah yang memang intensitas dalam reproduksi konfliknya yang cukup tinggi.

Banyak faktor yang cukup difahami ketika masyarakat sipil masih kurang tanggap melihat apa yang terjadi disekeliling mereka, terutama tentang melihat konflik di sekelilingnya, karena pada dasarnya sifat masyarakat Pajangan masih bersifat reaktif daripada proaktif, dan pembentukan jaringan diantara mereka masih sangat lemah dan tidak terlalu luas, sehingga kelompok/lembaga baru yang diharapkan lahir dari masyarakat akibat dari kesadaran pentingnya suatu perdamaian akan sulit terealisasi, sehingga dalam skala kecil dan belum terkoordinasi akan sulit bagi masyarakat untuk mempengaruhi suatu kebijakan politik dan pembangunan yang ada. Selain itu kesulitan lain yang dihadapi adalah beratnya hubungan konflik yang harus mereka hadapi, karena diakui konflik yang terjadi saat ini tidak hanya disebabkan oleh masalah-masalah sepele, melainkan sudah pada keadaan yang kompleks untuk diselesaikan.

Langkah pasti yang telah dilakukan pemerintah Bantul guna merespon segala macam gangguan sosial yang berbau konflik sudah cukup baik dan mengena kepada pokok permasalahan. Langkah-langkah konkrit seperti ini yang dibutuhkan masyarakat guna memutus rantai konflik yang telah menghantui masyarakat Pajangan, kedepannya tinggal mengawasi dan membantu berbagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten, karena peran masyarakat sipil sangat dibuthkan untuk mensukseskan berbagai macam program “cantik” yang telah dicanangkan dan diprogramkan, harus ada koordinasi yang dilakukan oleh semua pihak dalam proses pencegahan, penanganan ataupun treatment pasca konflik .

5. Membangun Damai Yang Bersifat Partisipatif, Inklusif dan Komprehensif

Pada tahap akhir pembangunan perdamaian harus dilihat dari setiap aspek dan setiap langkah yang dilalui, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dari setiap

langkah yang telah dilalui harus bersinergi berbagai aspek seperti partisipatif, inkresif dan komprehensif. Ketiga aspek ini paling tidak bisa memberikan jaminan bahwa semua program yang dibangun kedepannya akan berjalan dan dapat diterima dan dijalankan oleh semua pihak, karena semua aspek ini mewajibkan semua stakeholders untuk hadir dan aktif dalam proses awal hingga akhir.

Perpektif seperti itu memang harus benar diterapkan bila ingin mewujudkan suatu perdamaian jangka panjang. Namun perlu dipertimbangkan juga aspek lain yang tidak kalah penting, Integrated kemampuan untuk menyatukan, memadukan dan mengkombinasikan berbagai esititas dan komponen ke dalam sebuah sistem yang holistik Project/Program kemampuan untuk meencanakan dan melakukan serangkaian aktivitas atas penanganan dalam suatu kerangka program tertentu. Management kemampuan untuk merencanakan , mengorganisasikan, mengelola dan memonitor sejumlah sumber daya untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana pembangunan perdamaian yang dilakukan secara komprehensif, maksudnya adalah bagaimana semua program yang dibangun dalam jangka panjang harus mengena ke semua sektor kehidupan masyarakat. Prinsip dasar dari *peace building* adalah bagaimana membangun semua sektor yang harus dibenahi demi memutus rantai konflik yang sudah seringkali muncul. Kompleksitas penyebab konflik perlu adanya perubahan dari berbagai sektor kehidupan, karena perubahan yang menyeluruh wajib digulirkan bila ingin mewujudkan perdamaian jangka panjang. Reorientasi berbagai pihak dalam mewujudkan perdamaian jangka panjang, dari semula yang bersifat reaktif menjadi proaktif , dari tanggap dini menjadi respon diri, dari transisional menjadi transformatif dan rekonsiliatif demi mencapai perdamaian berkelanjutan (Trijono;2009). Semua aspek yang dibangun harus memenuhi sifat tersebut, ketergantungan dari setiap aspek tidak dapat dipisahkan satu demi satu dan dijalankan ke arah secara bersamaan dan perlu kerjasama dari semua pihak, sehingga perdamaian yang partisipatif serta mengakomodir semua kepentingan (inklusif) dan

semua aspek harus terkena perubahan (komprehensif) agar perdamaian abadi dapat segera terwujud di Kecamatan Pajangan.

E. Pandangan masyarakat terhadap camat

Istilah pemerintah menunjuk pada organ atau badan, yang menyelenggarakan urusan pemerintah sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Menurut S. Pamudji dalam Moeharto Tjokrowinoto Q004: 22-23). Dalam Undang-Undang otonomi daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah Gubernur (ditingkat propinsi), Bupati (ditingkat Kabupaten) atau Walikota (ditingkat kota) dan Camat (ditingkat Kecamatan). Kemudian yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan

Dalam kenyataan suatu pembangunan dari masyarakat pedesaan masih menemui kesulitan-kesulitan antara lain oleh karena keterbatasan sumber daya manusia. Dengan kondisi yang demikian itu maka inisiatif/prakarsa pemerintah kecamatan untuk memberdayakan kemampuan masyarakat desa menjadi sangat diperlukan dalam merealisasikan pembangunan Kecamatan. Sejak diberlakukannya Undang - Undang tentang tata kerja kecamatan pasal 27 Tahun 2004 dan diganti dengan UU pasal 225 No. 23 Tahun 2014. Hal ini membawa konsekuensi

bahwa untuk mengoptimalkan tugas dari camat, termasuk mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, diperlukan dukungan atau partisipasi dari semua komponen yang ada di tingkat desa ialah aparat pemerintah desa.

Jika dilihat dari tugas dan kewenangan Camat diatas, ada kaitanya dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan baik oleh aparat kecamatan sendiri maupun oleh masyarakat. Masalah-masalah yang muncul itu sangat terkait dengan bagaimana seorang pemimpin dalam hal ini seorang Camat berperilaku, berkoordinasi, memberikan instruksi, mengawasi, dan lain sebagainya. Kinerja aparat dibawahnya serta bagaimana hasil pelayanan terhadap masyarakat, sangat bergantung dari bagaimana kepemimpinan seorang camat. Bertolak dari permasalahan yang ada, maka Camat sebagai pemimpin pada unit organisasi dalam hal ini organisasi kecamatan kiranya memahami dan melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan terutama tugas dan kewenangan dari camat seperti tersebut diatas guna membawa institusi yang dipimpinnya menjadi lebih baik. Pada dasarnya setiap pemimpin, apakah dia seorang pemimpin tingkat atas, menengah dan pemimpin tingkat bawah, wajib melaksanakan empat fungsi, yakni; merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengawasi. Suatu organisasi akan berhasil atau gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan dari pemimpin organisasi yang bersangkutan, dengan demikian peranan pemimpin sangat penting dalam usaha mencapai suatu tujuan organisasi sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi yang dialami sebagian besar sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Tinggi rendahnya motivasi kerja seorang pegawai dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya lingkungan tempat bekerja. Oleh sebab itu, seorang pemimpin dapat menciptakan suasana kerja yang Menariknya permasalahan kepemimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seorang camat guna memajukan pembangunan di berbagai bidang pada wilayah kerjanya, penulis ingin mengatakan dalam tesis ini bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan camat dalam menjalankan perannya di Kecamatan Di

Pajangan. Melihat dari penolakan camat non muslim di Pajangan ini bisa mencidrai demokrasi di Indonesia, kenyataan tufoksi camat hanya SKD dari Bupati, dalam UUD tahun 2014 camat hanya mengatur admistrasi kecamatan dengan ketentuan tersebut.

Tugas Camat

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 UU No 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- 1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.

- 3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

- 1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- 2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan
- 3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kewenangan yang dilimpahkan dari bupati/walikota kepada Camat misalnya kebersihan di Kecamatan, pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu.

Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada Pasal 227 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu : Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota.Selanjutnya karena UU Pemerintahan Daerah ini masih baru Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan peraturan pemerintah. Sampai saat penulis menulis tulisan ini Peraturan Pemerintah mengenai Kecamatan belum keluar.